



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2026



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 -

SUMMARY

Skenario Pengembangan Wilayah RKP 2026

Strategi Utama Pengembangan Wilayah



Pengelompokan Lokasi Prioritas

Kawasan Pertumbuhan	Kawasan Perkotaan, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata, dan Ekonomi Biru
Kawasan Komoditas Unggulan	Komoditas unggulan (termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dsb) dan Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan
Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	Pengembangan pembangkit listrik, potensi sumber daya air, Kawasan Potensi Geotermal, Migas, Kilang terpadu, Sentra Produksi Pangan, dan Daerah Rawan Pangan, Energi dan Air
Kawasan Afirmasi	Kawasan Perdesaan, Perbatasan, Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil, Terluar, Terdepan.
Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	Hutan Lindung, Taman Nasional, Lahan Kritis, dan Keanekaragaman Hayati

Dukungan terhadap 8 Prioritas Nasional (PN)

PN1  Ideologi Pancasila, HAM, Demokrasi	PN2  Ketahanan Nasional: Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Digital, Biru, Syariah	PN3  Infrastruktur, UMKM, Industri Kreatif, Agromaritim	PN4  SDM, Sains, Gender, Pemuda & Disabilitas
PN5  Hilirisasi SDA dan Nilai Tambah Industri	PN6  Desa & Pemerataan Ekonomi	PN7  Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi	PN8  Lingkungan, Toleransi, Budaya Harmonis



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Sebagai elaborasi dari Lampiran I, arah pembangunan kewilayahan pada Lampiran IV merupakan pendetailan *highlight* intervensi dari narasi pada Bab 4 dan Bab 5 yang dijabarkan di tiap provinsi. Arah pembangunan kewilayahan memuat *highlight* intervensi secara umum maupun untuk setiap lokasi prioritas yang meliputi kawasan pertumbuhan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kawasan afirmasi untuk mendukung penurunan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, serta kawasan konservasi dan rawan bencana untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Arah pembangunan kewilayahan tersebut juga memperhatikan dukungan terhadap Asta Cita dan program Direktif Presiden (Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengelolaan Sampah, dan Pengentasan Kemiskinan). Direktif presiden tersebut selanjutnya dijabarkan dalam *highlight* intervensi pembangunan wilayah yang berlaku di masing-masing provinsi.

Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemberian Makanan Bergizi Gratis bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makanan Bergizi Gratis untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan *output*:

- ❖ Penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
- ❖ Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;
- ❖ Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan terkait penyelenggaraan MBG di institusi pendidikan;
- ❖ Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan lokal yang memenuhi standar mutu gizi;
- ❖ Penjaminan keamanan bahan pangan segar dan olahan;
- ❖ Pengawasan keamanan pangan;
- ❖ Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.

Pembangunan Sekolah Rakyat

Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan *output* pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Digitalisasi Pendidikan

Pemanfaatan *Platform* Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan *output* satuan pendidikan di seluruh jenjang mendapatkan pendampingan digitalisasi pendidikan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan *output*:

- ❖ Peningkatan kapasitas usaha koperasi;
- ❖ Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.

Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan *output*:

- ❖ Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur;
- ❖ Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat Penerima Akses Kelola Kawasan Hutan;
- ❖ Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
- ❖ Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH);
- ❖ Kartu Prakerja;
- ❖ Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha;
- ❖ Penguatan kewirausahaan petani melalui bantuan pertanian;
- ❖ Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan;
- ❖ Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).

Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan *output*:

- ❖ Bantuan PBI JKN;
- ❖ Kartu Indonesia Pintar;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- ❖ Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- ❖ Keluarga yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako;
- ❖ Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran;
- ❖ Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana;
- ❖ Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial;
- ❖ Asistensi rehabilitasi sosial untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, korban bencana dan kelompok rentan lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Aceh

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN

4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

7

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas

13

- ❖ Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho dan KPPPB Sabang
- ❖ Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe
- ❖ Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar
- ❖ Kawasan Perkotaan Meulaboh
- ❖ Kawasan Perkotaan Langsa
- ❖ Kawasan Perkotaan Subulussalam
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh
- ❖ Kawasan Swasembada Air dan Energi DT Gayo
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh
- ❖ Kawasan Afirmasi Simculue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan)
- ❖ Kawasan Perbatasan Prioritas Nasional/PKSN (3 kecamatan) atau Kecamatan Perbatasan Prioritas (28 Kecamatan)
- ❖ Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Pesisir Timur Aceh dan Pesisir Barat-Selatan Aceh dan
- ❖ Kawasan Konservasi T.N Gunung Leuser

24

Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Riset dan Inovasi Nasional
- ❖ Kementerian Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Provinsi Aceh

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1 A7	Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho (A1) dan KPBPB Sabang A7 <ul style="list-style-type: none"> • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh Besar • Kota Sabang 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Banda Aceh – Jantho dan KPBPB Sabang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan <i>missing link</i> Jantho–Keumala; • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Seni Budaya Indonesia Aceh melalui pembiayaan SBSN; • Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui pembiayaan SBSN; • Pembangunan IPA Kap. 2x20 Liter/detik SPAM IKK Seulimeum Kabupaten Aceh Besar; • Peningkatan IPA Kap. 20 SPAM Bendungan Paya Seunara Kota Sabang; • Pembangunan Peningkatan Gangway Pelabuhan Penyeberangan Balohan; • Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera.
A2	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe <ul style="list-style-type: none"> • Kota Lhokseumawe • Kab. Aceh Utara 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu; • Bidang minyak dan gas bumi; • Fasilitasi hilirisasi investasi strategis; • Revitalisasi industri pupuk dan hilirisasi gas bumi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Aceh Besar • Kab. Bireuen 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Kota Kuala Simpang - Bts. Prov Sukamto; • Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri; • Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri; • Pembangunan Bendungan Keureuto; • Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe - Proyek Strategis Nasional (PSN);
A3	<p>Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah • Kab. Gayo Lues 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Dataran Tinggi Gayo - Danau Laut Tawar, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Bts. Bireuen/Aceh Utara - Bts . Kota Lhoksumawe/Bts. Aceh Utara; • Preservasi Jalan Keumala - Geumpang; • Preservasi Jalan Idi Rayeuk - Peureluak.
A4	<p>Kawasan Perkotaan Meulaboh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Aceh Barat 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Meulaboh, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Bts. Aceh Jaya/Aceh Barat - Kota Meulaboh.
A5	<p>Kawasan Perkotaan Langsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Langsa 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Langsa, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa.
A6	<p>Kawasan Perkotaan Subulussalam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Subulussalam 	<p>Pengembangan kawasan perkotaan Subulussalam dengan konsep agribisnis. Pengembangan SPAM Perkotaan Subulussalam.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C1	<p>Kawasan Swasembada Pangan dan Energi</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Aceh Besar• Kab. Pidie• Kab. Aceh Utara• Kab. Aceh Timur• Kab. Aceh Tamiang• Kab. Aceh Tenggara• Kab. Aceh Barat• Kab. Aceh Barat Daya• Kab. Aceh Singkil	<p>Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Sigli;• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Pangkalan Susu;• Mencetak Lahan Pertanian;• Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;• Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;• Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan;• Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
C2	Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bener Meriah • Kab. Aceh Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan tol trans Sigli-Banda Aceh. Pengembangan Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Danau Laut Tawar; • Pembangunan infrastruktur PLTA Peusangan I & II #2.
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Aceh Jaya • Kab. Aceh Barat • Kab. Nagan Raya • Kab. Aceh Barat Daya 	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa; • Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci.
D1	D1 : Kawasan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut di Kab. Simeulue, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan HPL transmigrasi; • Penyediaan sarana produksi pertanian.
D2	Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan)	
D3	D2 : PKSN Sabang dan wilayah pendukung (Kec. Sukakarya, Sukajaya, dan Sukamamue – Kota Sabang	
	D3 : Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas)	Pengembangan Kawasan Perbatasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan; • Pembangunan Kawasan perbatasan di kecamatan, dengan <i>output</i> pemenuhan layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas.
	Kab. Aceh Besar (Kec. Masjid Raya), Kab. Pidie (Kec. Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga), Kab. Pidie Jaya (Kec. Panteraja, Meurah Dua, Ulim), Kab. Bireuen (Kec. Kuala), Kab. Aceh Utara (Kec. Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat), Kota Lhokseumawe (Kec.	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Muara Satu, Muara Dua, Banda Saki, Blang Mangat), Kab. Aceh Timur (Kec. Madat, Nurussalam, Darul Iman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun), Kota Langsa (Kec. Langsa Barat	
B1	<p>Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah 	<p>Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo, yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kab Bener Meriah.</p>
B2 B3	<p>Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Pesisir Timur Aceh (B2) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • B2: Pesisir Timur: Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang • B3: Pesisir Barat-Selatan: Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh 	<p>Pengembangan kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Pesisir Timur Aceh dan Pesisir Barat-Selatan Aceh, dengan <i>output</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian; • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Fasilitasi <i>prototyping</i> produk <i>betacarotene</i> dan <i>tocopherol</i> alami berbasis minyak sawit; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Selatan, Kab. Aceh Singkil	<p>transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; • Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan; • Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan.
E1	<p>Kawasan Konservasi TN Gunung Leuser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Gayo Lues • Kab. Aceh Barat Daya • Kab. Aceh Tenggara • Kab. Aceh Selatan <p>Provinsi Aceh</p>	<p>Pengembangan kawasan konservasi TN Gunung Leuser, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T; • Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan; • Penyediaan sarana produksi pertanian; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Rehabilitasi hutan mangrove;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di seluruh jenjang;• Pembangunan unit sekolah baru;• Menyediakan obat, bahan dan alat perbekalan pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan Skrining mobile penyakit menular (kusta, HIV/AIDS, filariasis, frambusia)• Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV)• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat;• Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan;• Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;• Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;• Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan;• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita, peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan, PONEK-PONED, layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>: skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan layanan KB berkualitas dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup <p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE),• Pelaksanaan Skrining Penyakit dan faktor resiko penyakit• Peningkatan kapasitas konseling Ipaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.• Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemucuan 5 pilar STBM. <p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Investasi pelayanan kesehatan primer di daerah;• Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi, dengan <i>output</i> pengembangan pendidikan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi laut• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>: skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau pengawasan operasional BBM 1 Harga dan atau pengawasan operasional BBM 1 Harga, Provinsi Aceh pada Kab/Kota:<ul style="list-style-type: none">○ Aceh Jaya○ Aceh Tengah○ Aceh Besar○ Aceh Tamiang○ Aceh Utara○ Aceh Selatan○ Aceh Timur○ Bireuen○ Pidie○ Pidie Jaya○ Simelue○ Bener Meriah• Peningkatan Infrastruktur Budidaya Udang – IISAP;• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu. <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan. <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain)• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran <p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p> <p>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan promosi industri gim nasional• Fasilitasi inkubasi dan akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan/pendampingan melalui inkubasi <i>Startup</i> digital• Pelatihan talenta digital yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan <p>Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</p>

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sumatera Utara

Ringkasan Prioritas Nasional



4

PN1 *Proyek*
(highlight)



53

PN2 *Proyek*
(highlight)



22

PN3 *Proyek*
(highlight)



76

PN4 *Proyek*
(highlight)



4

PN5 *Proyek*
(highlight)



28

PN6 *Proyek*
(highlight)



5

PN8 *Proyek*
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan
Bergizi Gratis

12

Jumlah
PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang
- ❖ Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei
- ❖ Kawasan Pariwisata Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Balige (Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba)
- ❖ Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsindimpuan
- ❖ Kawasan Perkotaan Rantauprapat
- ❖ Kawasan Perkotaan Kabanjahe
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan- Tanjungbalai
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis
- ❖ Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Ajibata
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas (10 kecamatan)
- ❖ Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis dan TN Gunung Leuser

31 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Ekonomi dan Kreatif
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan dan Kebijakan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pemberantasan Kemiskinan
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Provinsi Sumatera Utara

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	<p>Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Medan • Kota Binjai • Kab. Deli Serdang • Kab. Karo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan; • Penataan Kota Lama Kesawan; • Medan <i>Urban Traffic Improvement Project</i>; • Pengendalian banjir Wilayah Metropolitan Medan; • Preservasi Jalan Perbaungan - Sei Buluh; • Preservasi Jalan Sei Buluh - Sei Rampah; • Pembangunan Jalan Tol Medan Binjai bagian dari Trans Sumatera; • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Belawan; • Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera; • Lahan rusak yang dipulihkan di Kab. Deli Serdang. • Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan;
A2	<p>Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei, termasuk KEK Sei Mangkei;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM; • Preservasi Jalan Sei Rampah - Tebing Tinggi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Batubara • Kab. Simalungun • Kota Tebing Tinggi • Kota Pematangsiantar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Pengembangan KEK Sei Mangkei – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina Terpadu, dengan pembangunan <i>smelter</i> di Kuala Tanjung Sumatera Utara; • Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera); • Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri; • Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri; • Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi, Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi.
A3	Kawasan Pariwisata Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Toba (Balige) (Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan 6A Pariwisata dan Urban Renewal di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Pariwisata Prioritas Danau Toba) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Simalungun • Kab. Pakpak Bharat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba • Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera; • Pembangunan Jalan Tol Inderapura – Kuala Tanjung; • Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara; • Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional - Kota Medan; • Peningkatan SPAM Kap. 40 Liter/detik SPAM IKK Parapat Kabupaten Simalungun; • Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Danau Toba di Parapat.
A4	Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan- Padangsidimpuan <ul style="list-style-type: none"> • Kota Sibolga • Kab. Tapanuli Tengah • Kota Padangsidimpuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana STAIN Mandailing Natal melalui pembiayaan SBSN; • Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Padangsidimpuan melalui pembiayaan SBSN.
A5	Kawasan Perkotaan Rantauprapat <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Labuhanbatu 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Rantauprapat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat-Kisaran; • Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A6	Kawasan Perkotaan Kabanjahe <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Karo 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kabanjahe sebagai pusat kegiatan.
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu • Kab. Labuhanbatu Utara • Kab. Labuhanbatu Selatan • Kab. Padanglawas • Kab. Padanglawas Utara 	Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; • Jalan Tol Kisaran -Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera.
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan-Tanjungbalai <ul style="list-style-type: none"> • Kota Tanjungbalai • Kab. Asahan 	Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru meliputi Kota Tanjungbalai dan Kab. Asahan.
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Nias Utara 	Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru meliputi Kab. Nias Utara.
C1	Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Langkat • Kab. Deli Serdang • Kab. Serdang Bedagai • Kab. Simalungun • Kab. Batu Bara 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Simpang Pangkalan Susu - Tanjung Pura; • Pengembangan Bendungan Lausimeme; Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan <i>input</i> dan sarana-prasarana pertanian;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan lahan produktivitas pertanian; • Membangun infrastruktur pertanian; • Alat dan mesin pertanian.
C2	<p>Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Pakpak Bharat • Kab. Tapanuli Tengah • Kab. Nias • Kab. Nias Selatan • Kota Gunungsitoli 	<p>Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan <i>input</i> dan sarana-prasarana pertanian; • Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan lahan produktivitas pertanian; • Membangun infrastruktur pertanian; • Alat dan mesin pertanian.
		<ul style="list-style-type: none"> • Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Danau Toba di Sigaul Marom;
		<ul style="list-style-type: none"> • Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Sungai Asahan di Bendung Siruar Kabupaten Tobasa Sumut;
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-PLTA Batang toru;
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan PLTMH (Sisira, Simonggo, Simbelin, Lae Ordi).
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tapanuli Selatan • Kab. Mandailing Natal • Kab. Padang Lawas • Kab. Padang Lawas Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Simpang Natal – Gambir; <p>Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Batang Angkola-Batang Gadis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan <i>input</i> dan sarana-prasarana pertanian; • Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Padangsidempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan lahan produktivitas pertanian; • Membangun infrastruktur pertanian; • Alat dan mesin pertanian.
D1 A7	<p>Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (A7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Nias • Kab. Nias Utara* • Kab. Nias Barat • Kab. Nias Selatan • Kota Gunungsitoli <p>Keterangan: *) Daerah Tertinggal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RS Berkualitas di Kab/Kota; • Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa-Tureloto, Kep. Batu; • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif; • Penyediaan layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D2	Kawasan Perdesaan Prioritas Ajibata <ul style="list-style-type: none">• Kab. Toba	Pengembangan Kawasan Perdesaan Ajibata, Kabupaten Toba, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;• Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan;• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan;• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
D3	Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) <ul style="list-style-type: none">• Kab. Langkat (Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura),	Pembangunan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas dengan <i>output</i> pemenuhan layanan dasar di Kecamatan Perbatasan Prioritas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
E1 E2	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Serdang Bedagai (Tanjung Beringin, Bandar Khalipah), • Kab. Batu Bara (Sei Suka) dan • Kab. Asahan: (Silau Laut, Sei Kewayang Timur) 	<p>Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Leuser (E2), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan hutan lestari.
	<p>Provinsi Sumatera Utara</p>	
	<p>Provinsi Sumatera Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan ternak ruminansia potong.• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Sumatera Utara pada Kab/Kota:<ul style="list-style-type: none">○ Pakpak Bharat○ Humbang Hasundutan○ Tapanuli Utara○ Nias Utara○ Nias Selatan○ Nias○ Tapanuli Selatan○ Samosir○ Padang Lawas Utara○ Serdang Bedagai• Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T, meliputi 10 kecamatan perbatasan prioritas.• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.• Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan.• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM.• Pendidikan HAM bagi K/L/D.• Pelaksanaan ToT Diklat perancang PUU yang berspektif HAM.
	Provinsi Sumatera Utara	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan;• Pembangunan unit sekolah baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Sumatera Utara	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan dan alat dan perbekalan pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penemuan aktif dan <i>Skринing mobile</i> penyakit menular;• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, Malaria, HIV, Schistosomiasis);• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan untuk program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat.
	Provinsi Sumatera Utara	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.
	Provinsi Sumatera Utara	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di RS Daerah serta mengembangkan layanan unggulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</p> <ul style="list-style-type: none">• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan. <p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir, serta;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi. <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan. <p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan surveillans kualitas air minum dan;• Kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir.• Melakukan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA.• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis.• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis.• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah.
		<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak.• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.• Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan.
	Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha.• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM.• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal.• Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis.
	Provinsi Sumatera Utara	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan.• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak.• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sumatera Barat

Ringkasan Prioritas Nasional



* Satu proyek dapat lebih dari satu PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

2

Jumlah PSN



Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman
- ❖ Kawasan Pariwisata Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru Pasaman Barat
- ❖ Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci-Seblat

36 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Komisi Pemberantasan Korupsi
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Provinsi Sumatera Barat

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman <ul style="list-style-type: none"> • Kota Padang • Kota Pariaman • Kab. Padang Pariaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit.
A2	Kawasan Pariwisata Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi-Padangpanjang dan Kawasan Perkotaan Solok-Sawahlunto) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kab. Dharmasraya • Kota Bukittinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan <i>waterfront</i> Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah; • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera • Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera • Pembangunan <i>Fly Over</i> Sitinjau Lauik; • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit; • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Bukittinggi melalui pembiayaan SBSN; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh melalui pembiayaan SBSN; • Preservasi Jalan Muara Kalaban – Tanah Badantung; • Preservasi Jalan Lubuk Selasih – Surian;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C1	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Padangpanjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Sei Dareh <i>Junction</i> – Kota Baru;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Solok 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Tanah Badantung Kiliranjao;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bank Sampah Induk 1 unit di Daerah Solok.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Payakumbuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencetak lahan pertanian;
	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tanah Datar 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur pertanian;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Agam 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat dan mesin pertanian;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Solok 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SPAM – Peningkatan IPA Kap. 50 Liter/detik SPAM Sontang Kabupaten Pasaman;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Solok Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Banjir Lahar/Sedimen Gunung Marapi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Limapuluh Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan PLTMH (Rabi Jonggor, Tras)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Sijunjung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Dharmasraya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas hortikultura
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pasaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ternak ruminansia potong
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi 	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani
C2	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Padang Pariaman • Kab. Pasaman Barat • Kab. Kepulauan Mentawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Membangun infrastruktur pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
D1	Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Agam 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
D2	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> • KT Muara Takung – Kamang Baru, Kab. Sijunjung 	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung – Kamang Baru, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D3	Kawasan Transmigrasi (KT)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut, dengan <i>output</i> :
	<ul style="list-style-type: none"> • KT Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.
B1	Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan dan Ekonomi Biru Pasaman Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan;
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pasaman Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi.
E1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Kerinci-Seblat	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pengamanan hutan; • Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Solok Selatan • Kab. Dharmasraya 	
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik.
	Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan jaringan cerdas (<i>smart grid</i>) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;• Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T;• Pembangunan jaringan <i>broadband</i> hingga ke pelosok;• Pelindungan dan pelestarian warisan budaya;• Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;• Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran;• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;• Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;• Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan;• Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD. <p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran pemukiman kumuh;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular;• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, Malaria, HIV, Schistosomiasis);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat. <p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas sarana RS Daerah Tipe C atau D Pratama menjadi setara tipe C di Kabupaten Kepulauan Mentawai;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan. <p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pascapersalinan;• Peningkatan Kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONEK-PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi. <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, dan layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup. <p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan. <p>Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang• Pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
		<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;
		<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya;
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi, dengan <i>output</i> pengembangan pendidikan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi laut.
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
		<ul style="list-style-type: none">• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Sumatera Barat pada Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kepulauan Mentawai.
		<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p> <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran. <p>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan promosi industri gim nasional;• Fasilitasi inkubasi dan akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia;• Pembinaan/pendampingan melalui inkubasi <i>Startup</i> digital;• Pelatihan talenta digital yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan. <p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan; <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan unit sekolah baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Seputar *Highlight* Intervensi **Provinsi Riau**

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

5

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Pekanbaru
- ❖ Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai
- ❖ Kawasan Perkotaan Rengat
- ❖ Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Rokan-Siak-Kampar-Indragiri
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir dan Indragiri Hilir
- ❖ Kawasan Swasembada Energi Riau
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Air
- ❖ Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis
- ❖ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis dan Wilayah Pendukung
- ❖ Kecamatan Perbatasan Prioritas Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir
- ❖ Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Zamrud, TN Teso Nilo, dan TN Bukit Tigapuluh

30 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Provinsi Riau

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Pekanbaru <ul style="list-style-type: none"> • Kota Pekanbaru • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekanbaru dan sekitarnya (Pekansikawan), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru; • Pembangunan Jalan Tol Rengat - Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru - IC Bypass Pekanbaru); • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera; • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh -Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera; • Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan Waterfront Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura; • Pengembangan Kawasan Industri Hijau Futong – Proyek Strategis Nasional (PSN).
A2	Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai <ul style="list-style-type: none"> • Kota Dumai 	Pengembangan kawasan perkotaan Dumai dan kawasan pengembangan Industri Dumai, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Simpang Lago – Sorek; • Preservasi Jalan Simpang Batang - Bts Kota Dumai; • Preservasi Jalan SP. Terminal - SP. Purnama (Pelabuhan Penyeberangan RO-RO (Dumai); • Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai/Sumatera Utara-Riau;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan - SBSN; • Preservasi Jalan Simpang Batang - Simpang Kulim; • RDMP RU II Dumai (<i>rescoping</i>).
A3	Kawasan Perkotaan Rengat <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Indragiri Hulu 	Peningkatan infrastruktur pada Kawasan Perkotaan Rengat dengan <i>output</i> Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat-Jambi.
B1	Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Rokan-Siak-Kampar-Indragiri <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi 	Pengembangan Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Rokan-Siak-Kampar-Indragiri, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi.
B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir (B2) dan Indragiri Hilir (B3) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Rokan Hilir • Kab. Indragiri Hilir 	Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir dan Indragiri Hilir dengan <i>output</i> kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
C1	Kawasan Swasembada Energi Riau <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kep. Meranti 	Pengembangan kawasan swasembada energi Riau dengan <i>output</i> Pembangunan PLTMG Riau.
C2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi • Kab. Bengkalis • Kab. Siak • Kab. Kampar 	Pengembangan kawasan Swasembada Pangan dan Air, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Replacement Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung. • Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian; • Alat dan Mesin Pertanian; • Dukungan sarana produksi pertanian; • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi (kecuali Papua Pegunungan dan Papua Tengah); • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D1	<p>Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kep. Meranti • Kab. Bengkalis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani. <p>Pengembangan kawasan afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana STAIN Bengkalis melalui pembiayaan SBSN; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Bengkalis melalui pembiayaan SBSN; • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan).
D2 D3	<p>Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis dan Wilayah Pendukung: Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis (D2)</p> <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas (D3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kep. Meranti (Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir, dan Kec. Rangsang) • Kab. Rokan Hilir (Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau 	<p>Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Bengkalis, yang terdiri dari Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi serta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis; • Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i> pemenuhan layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kapas, dan Kec. Sinaboi)	
E1 E2 E3	<p>Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Zamrud (E1), TN Tesso Nilo (E2), dan TN Bukit Tigapuluh (E3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamrud: Kab. Siak • TN Tesso Nilo: Kab. Pelalawan • TN Bukit Tigapuluh: Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir 	<p>Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Zamrud dengan <i>output</i> pengurangan status keterancamannya spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan.</p>
	Provinsi Riau	<p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di seluruh jenjang; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). <p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan</p> <p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan;• Melakukan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:<ul style="list-style-type: none">o Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita ,o Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan,o Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);o Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;o Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.• Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>: penguatan KIE, skrining, peningkatan kapasitas konseling UBM serta penerapan & penegakan KTR , layanan UBM, dan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan;• Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemecuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;• Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD. <p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular;• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, Malaria, HIV, Schistosomiasis);• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat. <p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di RS Daerah serta mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data Kesehatan;• Peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan Kesehatan Reproduksi. <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>: skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</p> <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> dengan <i>output</i> Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum <i>sanitasi</i>, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran <p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan. <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Riau, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital;• <i>Event</i> film, musik, dan seni;• Penguatan fasilitasi dan kerjasama dalam perlindungan, dan pengembangan warisan budaya;• Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;• Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;• Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya. <p>Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Riau pada Kab/Kota:<ul style="list-style-type: none">○ Kuantan Singingi○ Indragiri Hulu○ Indragiri Hilir○ Rokan Hilir○ Kepulauan Meranti



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T.
	Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan.
	Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Kawasan Industri Hijau Futong.
	Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang.
	Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan gas kota.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Jambi

Ringkasan Prioritas Nasional



4

PN1
Proyek
(highlight)



13

PN2
Proyek
(highlight)



9

PN3
Proyek
(highlight)



55

PN4
Proyek
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



28

PN6
Proyek
(highlight)



11

PNs
Proyek
(highlight)

4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan
Bergizi Gratis

3

Jumlah
PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Jambi dan Kawasan Pariwisata Unggulan Candi Muarojambi
- ❖ Kawasan Perkotaan Bangko
- ❖ Kawasan Perkotaan Muara Bungo
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung dan Batanghari
- ❖ Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi
- ❖ Kawasan Perdesaan Agro Wisata (Kab. Tebo)
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Kelapa, dan Komoditas Unggulan Perkebunan lainnya Tanjungjabung
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Kelapa, dan Komoditas Unggulan Perkebunan lainnya Cekungan Batanghari
- ❖ Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Duabelas, TN Bukit Tigapuluh, TN Berbak dan Sembilang, dan TN Kerinci-Seblat

24 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Provinsi Jambi

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1 A2	Kawasan Perkotaan Jambi (A1) dan Kawasan Pariwisata Unggulan Candi Muarojambi (A2) • Kota Jambi • Kab. Muaro Jambi	Pengembangan Kawasan Perkotaan Jambi dan Kawasan Pariwisata Unggulan Candi Muarojambi, dengan <i>output</i> : • Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino- Jambi - Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera; • Preservasi Jalan Tempino - Bts Provinsi Sumsel; • Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi.
A3	Kawasan Perkotaan Bangko • Kab. Merangin	Pengembangan Kawasan Perkotaan Bangko, dengan <i>output</i> : • Preservasi Jalan BTS. Kota Bangko - BTS. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin.
A5	Kawasan Perkotaan Muara Bungo • Kab. Bungo	Pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Bungo, dengan <i>output</i> : • Preservasi JLN. Lintas Sumatera II Muara Bungo (SP. Jambi - BTS. Kota Muara Bungo).
C1	Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung dan Batanghari • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur • Kab. Tebo	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung dan Batanghari, dengan <i>output</i> : • Mencetak Lahan Pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Batanghari 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Lubuk Kambing – Merlung; • Preservasi Jalan Simpang Tiga Batara Gas Plant - Bts Kota Kuala Tungkal.
C2	<p>Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tebo • Kab. Sarolangun 	<p>Pengembangan Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Irigasi DI Batang Asai; • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Peningkatan Kap. IPA 50 Liter/detik SPAM IKK Wirotho Agung Kabupaten Tebo; • Preservasi Jalan Sei Bengkal - Muara Tebo.
C3	<p>Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kerinci • Kab. Merangin • Kota Sungai Penuh • Kab. Sarolangun 	<p>Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencetak Lahan Pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
B1	<p>Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Kelapa, dan Komoditas Perkebunan Unggulan lainnya Tanjung Jabung</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Tanjung Jabung Barat• Kab. Tanjung Jabung Timur	<ul style="list-style-type: none">• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.• Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggulan.
B2	<p>Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Komoditas Perkebunan Unggulan lainnya Cekungan Batanghari</p> <ul style="list-style-type: none">• Muaro Jambi• Kab. Bungo• Kab. Tebo• Kab. Batanghari• Kab. Merangin	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggulan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D1	Kawasan Perdesaan Agro Wisata • Kab. Tebo	Pengembangan Kawasan Perdesaan Agro Wisata (Kab. Tebo), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan;• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
E1 E2 E3 E4	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Duabelas (E1), TN Bukit Tigapuluh (E2), TN Berbak dan Sembilang (E3), dan TN Kerinci-Seblat (E4) • TN Bukit Duabelas: Kab.	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Duabelas, TN Bukit Tigapuluh, TN Berbak dan Sembilang, dan TN Kerinci-Seblat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan hutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Batanghari, Kab. Tebo</p> <ul style="list-style-type: none">• TN Bukit Tigapuluh: Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat• TN Berbak dan Sembilang: Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi• TN Kerinci-Seblat: Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kota Sungai Penuh	
	Provinsi Jambi	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan;• Pembangunan unit sekolah baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Jambi	<p>Pengendalian penyakit dan peningkatan RS berkualitas di Kab/Kota, dengan <i>ouput</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;• Penyediaan Badan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan;• Penyediaan program Skrining bayi baru lahir;• Penyediaan program pencegahan kanker leher rahim termasuk <i>di antaranya</i> dengan Skrining dan vaksinasi HPV DNA;• Layanan Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta;• Daerah yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7];• RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan);• Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;• Sarana Puskesmas, Pustu dan Posyandu (SOPHI);• Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7].
	Provinsi Jambi	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemecuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	Provinsi Jambi	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Jambi	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) -Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Jambi	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jambi	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;
	Provinsi Jambi	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Provinsi Jambi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;• Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK;• Desa pemajuan kebudayaan;• Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital;• Pengembangan fasilitasi dan kerjasama dalam perlindungan dan pengembangan warisan budaya;• Giat warisan budaya;• Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;• Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;• Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya;
	Provinsi Jambi	Peningkatan pengelolaan risiko bencana, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Jambi	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pemberi bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. <p>Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;• Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran.
	Provinsi Jambi	<p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berpekspektif Gender, dengan <i>ouput</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM.
	Provinsi Jambi	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular;• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat.
	Provinsi Jambi	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.
	Provinsi Jambi	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas Sarana RS Daerah Tipe D atau D Pratama menjadi setara Tipe C di Kab. Kerinci;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.
	Provinsi Jambi	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
	Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya;
	Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Jambi pada Kab/Kota:<ul style="list-style-type: none">○ Tebo○ Bungo○ Tanjung Jabung Timur○ Tanjung Jabung Barat○ Sarolangun○ Merangin
	Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">• Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Sumatera Selatan

Ringkasan Prioritas Nasional



5 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sampah



Program Makan Bergizi Gratis

5

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin
- ❖ Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjungenim
- ❖ Kawasan Perkotaan Lubuklinggau
- ❖ Kawasan Perkotaan Baturaja
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering-Banyuasin
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu
- ❖ Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi
- ❖ Kawasan Transmigrasi Petata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- ❖ Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir
- ❖ Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin
- ❖ Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat
- ❖ Taman Nasional Bukit Barisan Selatan: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- ❖ Taman Nasional Sembilang: Kab. Banyuasin
- ❖ Taman Nasional Kerinci-Seblat

31 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin <ul style="list-style-type: none">• Kota Palembang• Kab. Banyuasin• Kab. Ogan Ilir• Kab. Ogan Komering Ilir	Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan TOD dan <i>Urban Renewal</i> Kawasan Stasiun Ampera;• Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palembang;• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL) Kota Palembang;• RDMP RU III Plaju (Rescoping);• Pembangunan FO Sudirman;• Penyelenggaraan layanan perintis LRT Sumatera Selatan;• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota di Kab. Ogan Komering Ilir - Pembangunan IPA Kap. 60 Liter/detik SPAM IKK Air Sugihan;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Sriwijaya melalui pembiayaan SBSN;• Pembangunan pelabuhan Palembang Baru/<i>New</i> Palembang;• Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung;• Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Palembang;• Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan <i>output</i> Pembangunan PLTSa di Kota Palembang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A2	Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim <ul style="list-style-type: none">Kab. Muara Enim	<ul style="list-style-type: none">Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan. Pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan layanan dasar dan penyediaan ruang terbuka hijau;Pengembangan industri gasifikasi/hilirisasi batubara di Tanjung Enim;Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi serta sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota;Preservasi Jalan Kota Muara Enim - Simpang Sugih Waras;Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Enim – Proyek Strategis Nasional (PSN).
A4	Kawasan Perkotaan Baturaja <ul style="list-style-type: none">Kab. Ogan Komerling Ulu	Kawasan Perkotaan Baturaja, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan layanan dasar dan penyediaan ruang terbuka hijau;Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi serta sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota;Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> pada RS Tk. III dr. Noesmir Baturaja;Preservasi Jalan Kota Baturaja – Martapura.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A3	Kawasan Perkotaan Lubuklinggau <ul style="list-style-type: none"> • Kota Lubuklinggau 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan layanan dasar dan penyediaan ruang terbuka hijau.
C1	Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering-Banyuasin <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur 	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering-Banyuasin, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, yaitu DI Komering; • Mencetak lahan pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Dukungan sarana produksi pertanian; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Pengembangan lahan sawah rawa pasang surut tanah mineral dan rawa lebak tanah mineral; • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
C2	Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kota Pagar Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani. Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, yaitu DI Lematang; • Mencetak lahan pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Dukungan sarana produksi pertanian; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Pengembangan lahan sawah rawa pasang surut tanah mineral dan rawa lebak tanah mineral; • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C3	Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi	Pengembangan Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi, dengan <i>output</i> :
	<ul style="list-style-type: none">• Kab. Musi Rawas• Kab. Musi Rawas Utara• Kab. Empat Lawang• Kab. Lahat• Kab. Muara Enim• Kab. Banyuasin• Kab. Musi Banyuasin• Kab. Ogan Komering Ilir• Kab. Ogan Ilir• Kab. Ogan Komering Ulu• Kab. Ogan Komering Ulu Timur• Kab. Ogan Komering Ulu Selatan• Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	<ul style="list-style-type: none">• Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara;• Pembangunan PLTU Mulut Tambang;• Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji;• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi listrik 275 kV Betung - Palembang 1/Palembang Utara;• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1;• Preservasi Jalan Provinsi Jambi – Peninggalan;• Upgrading kilang-kilang eksisting/<i>Refinery Development Master Plan (RDMP)</i>.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
B2	<p>Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan, Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur • Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 	<p>Pengembangan Kawasan Komoditas Perkebunan Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi; • Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; • Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan; • Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan.
E1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan
E2	TN Bukit Barisan Selatan (E1), TN	(E1), TN Berbak Sembilang (E2), dan TN
E3	Berkak Sembilang	Kerinci-Seblat (E3), dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	(E2), dan TN Kerinci-Seblat (E3) <ul style="list-style-type: none"> • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • TN Sembilang: Kab. Banyuasin • TN Kerinci-Seblat: Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Musi Rawas, Kota Lubuklinggau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem, dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi.
Provinsi Selatan	Sumatera	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Provinsi Selatan	Sumatera	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penemuan aktif dan <i>skrining mobile</i>; • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;• Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D;• Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan;• Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.
Provinsi Selatan	Sumatera	Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;
Provinsi Selatan	Sumatera	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, • Penguatan UKS, kesehatan kerja, dan layanan geriatri • Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); • Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit • Peningkatan layanan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM); • Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); • Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan <i>surveillans</i> kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan <i>skrining mobile</i> penyakit menular;• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV);• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC bagi masyarakat.
	Provinsi Sumatera Selatan	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas Sarana RS Daerah Tipe D atau D Pratama menjadi setara Tipe C di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, dan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;• Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak).
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran;• Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan Pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan Keputusan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses Pembangunan.
	Provinsi Selatan Sumatera	Pengembangan infrastruktur energi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan;
	Provinsi Selatan Sumatera	Pengembangan infrastruktur digital, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;• Perluasan layanan penyiaran digital.
	Provinsi Selatan Sumatera	Peningkatan pengelolaan risiko bencana, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyiarkan informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;• Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;• Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran;
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berpekspektif Gender, dengan <i>ouput</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Pengembangan infrastruktur permukiman, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infras permukiman dan aksesibilitas logistik;• Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu;• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
D1	Kawasan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata
D2	Transmigrasi (KT):	di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, dengan <i>output</i> :
D3	• D1: KT Petata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi;
D4	• D2: KT Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir	• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi.
	• D3: KT Telang di Kabupaten Banyuasin	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kab. Ogan Ilir, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.
	• D4: KT Kikim di Kabupaten Lahat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang di Kab. Banyuasin, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kab. Lahat, dengan <i>output</i> :
		• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;
		• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.
	Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> :
		• Identifikasi kebutuhan bantuan pemberdayaan untuk mengolah tanah dengan <i>output</i> akses RA;
		• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
		• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
	Provinsi Sumatera Selatan	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Peningkatan perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; • Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; • Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Pengembangan KSPP Sumatera Selatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi geospasial melalui pengembangan infrastruktur pertanian seperti jalan dan jembatan, rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruktur Presiden No. 2 Tahun 2025; • Penguatan <i>On Farm</i> melalui dukungan pupuk, benih spesifik lokasi, serta peningkatan input pembenah tanah; • Penguatan <i>Off Farm</i> melalui peningkatan akses internet dan kapasitas petani.
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p>
Provinsi Selatan	Sumatera	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		perumahan melalui FLPP, optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Sumatera Selatan	Pembangunan jaringan gas kota.
	Provinsi Sumatera Selatan	Peningkatan konektivitas dan pengembangan kawasan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Kereta api logistik Lahat – Kertapati;• Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera;• Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera;• Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 92 -

Seputar *Highlight* Intervensi **Provinsi Bengkulu**

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

2

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulau Baai
- ❖ Kawasan Perkotaan Manna
- ❖ Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan
- ❖ Kawasan Afirmasi Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
- ❖ Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani, Kabupaten Bengkulu Selatan
- ❖ Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara
- ❖ Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Kerinci-Seblat

30 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Provinsi Bengkulu

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulau Baai <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bengkulu 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulau Baai, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan ruas Bengkulu-Tais, Bengkulu-Mukomuko, dan Bengkulu-Argamakmur-Tubei; • Preservasi Jalan SP. DPRD (TUGU HIU) - SP. NAKAU; • Pengendalian banjir Kota Bengkulu.
A2	Kawasan Perkotaan Manna <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bengkulu Selatan 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Manna, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kota agropolitan Manna.
C1	Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Lebong • Kab. Seluma 	Pengembangan Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur PLTP Hululais; • Konservasi sumber daya air, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial; • Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Benteng Kobema; • Perluasan SPAM - Perluasan Jaringan Distribusi SPAM Regional Benteng Kobema Kota Bengkulu; • Perluasan SPAM - Perluasan Jaringan Distribusi SPAM Regional Benteng Kobema Kab. Bengkulu Tengah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C2	Kawasan Swasembada Pangan Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mukomuko • Kab. Bengkulu Utara • Kab. Seluma • Kab. Bengkulu Selatan • Kab. Kaur 	Upaya Pemenuhan Swasembada Pangan Mukomuko – Bengkulu Utara – Seluma – Bengkulu Selatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, yaitu D. I. Air Seluma; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Mencetak lahan pertanian; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Alat dan mesin pertanian; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana produksi pertanian; • Pembangunan SPAM - Pembangunan IPA Kap. 30 Liter/detik SPAM IKK Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
D1	Kawasan Pulau Afirmasi Enggano	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah sakit berkualitas di Pulau Enggano (PHTC);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D2	(Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Bengkulu Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat penelitian biodiversitas tropis Enggano; • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif.
	Kawasan <i>Food Estate</i> Berbasis Korporasi Petani, Kabupaten Bengkulu Selatan	<p>Kawasan <i>Food Estate</i> Berbasis Korporasi Petani, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D3	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> • D3: KT Lagita, Kabupaten Bengkulu Utara 	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita di Kab. Bengkulu Utara, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Kerinci-Seblat <ul style="list-style-type: none"> • E1: TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Kaur • E2: TN Kerinci-Seblat: Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi; • Penguatan pengelolaan hutan lestari; • Perlindungan dan pengamanan hutan.
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bengkulu	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan;• Pembangunan unit sekolah baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu melalui Pembiayaan SBSN;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Curup melalui Pembiayaan SBSN;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan konvergensi layanan;
	Provinsi Bengkulu	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT); • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Melakukan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular; • Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta; • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, Malaria, HIV, Schistosomiasis); • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi Masyarakat.
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Perluasan layanan penyiaran digital;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri dan UMKM halal, peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Preservasi Jalan Lais – Kerkap;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan komoditas perkebunan kopi;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bengkulu	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Bengkulu	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>: skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup;
	Provinsi Bengkulu	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan KIE;• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;• Penerapan & penegakan KTR;• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Bengkulu	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain)• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran
	Provinsi Bengkulu	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan Kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 103 -


Seputar *Highlight* Intervensi **Provinsi Lampung**

Ringkasan Prioritas Nasional

 **4**
PN1 *Proyek*
(highlight)

 **25**
PN2 *Proyek*
(highlight)

 **24**
PN3 *Proyek*
(highlight)

 **47**
PN4 *Proyek*
(highlight)

 **9**
PN6 *Proyek*
(highlight)

 **11**
PN8 *Proyek*
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

4

Jumlah PSN



Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan
- ❖ Kawasan Perkotaan Menggala
- ❖ Kawasan Perkotaan Kotabumi
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulang Bawang
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Air Seputih-Sekampung
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan Lampung
- ❖ Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Waykambas
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung

27 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Perencanaan; Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

Provinsi Lampung

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1 A2	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (A2) <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bandar Lampung • Kab. Lampung Selatan • Kab. Tanggamus • Kota Metro 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan ruas Bandar Lampung-Gedong Tataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Metro melalui pembiayaan SBSN; • Pembangunan infrastruktur PLTP Rajabasa; • Perluasan SPAM - Perluasan Jaringan Distribusi Mendukung SPAM KPBU Kota Bandar Lampung; • Pengembangan Kawasan Terintegrasi Merak - Bakauheni - Proyek Strategi Nasional (PSN).
A3	Kawasan Perkotaan Kotabumi <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Lampung Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Bujung Tenuk - Terbanggi Besar; • Preservasi Jalan - SP. Empat - Bukit Kemuning; • Preservasi Jalan Simp Kota Kotabumi (KLP Tujuh) - Terbanggi Besar.
A4	Kawasan Perkotaan Menggala <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tulang Bawang 	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulang Bawang <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Way Kanan • Kab. Tulang Bawang • Kab. Mesuji 	Upaya Pemenuhan Swasembada Pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi SPAM IKK Pakuan Ratu Kab. Way Kanan; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Mencetak lahan pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Pengembangan ternak ruminansia potong;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan input, sarana, dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
C2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Seputih-Sekampung <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Lampung Timur • Kab. Lampung Selatan • Kab. Pringsewu • Kab. Pesawaran 	Upaya Pemenuhan Swasembada Pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem; • Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Mencetak lahan pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Sekampung; • Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Marga Tiga;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan input, sarana, dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
B1	<p>Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Lampung Timur• Kab. Tulang Bawang• Kab. Lampung Selatan	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi wilayah barat Indonesia.
B2	<p>Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan Lampung</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Lampung Barat• Kab. Tanggamus• Kab. Pesawaran	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;• Preservasi Jalan Sp Kalianda – Bakauheni.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Lampung Selatan • Kab. Lampung Timur 	
E1 E2	<p>Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan (E1) dan TN Waykambas (E2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat • TN Waykambas: Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi; • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana.
	<p>Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pesisir Barat • Kab. Tanggamus • Kab. Lampung Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman <i>megathrust</i> dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Pesisir Selatan Lampung (<i>Megathrust</i> Selat Sunda).
	Provinsi Lampung	<p>Peningkatan infrastruktur untuk mendukung swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan; • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPAM - Pembangunan Prasarana Air Minum SMA Kebangsaan Lampung Kabupaten Lampung Selatan. <p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap di dunia usaha dan dunia industri, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Lampung	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain); • Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.
	Provinsi Lampung	<p>Pengendalian penyakit, pembudayaan hidup sehat, pelayanan Kesehatan, dan peningkatan Kesehatan ibu dan anak dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;• Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;• Meningkatkan kapasitas Sarana RS Daerah Tipe D atau D Paratama menjadi setara Tipe C di Kab. Tulang Bawang Barat;• Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Lampung, serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM melalui pembiayaan PHLN;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;• Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM, terutama melalui pengendalian konsumsi produk yang berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; penerapan label gizi; serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;
	Provinsi Lampung	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro dengan <i>output</i> : skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Lampung	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none">• Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i>: penguatan <i>surveillans</i> kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Lampung	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Investasi pelayanan kesehatan primer;• Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan.
	Provinsi Lampung	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Melakukan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular; • Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta; • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, Malaria, HIV, <i>Schistosomiasis</i>); • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC bagi masyarakat.
	Provinsi Lampung	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta kawasan rawan bencana; • Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat.
	Provinsi Lampung	<p>Peningkatan ekonomi syariah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal.
		<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Pelaksanaan praktik jurnalistik dan pers yang baik, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers;• Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;• Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran;• Mengawasi lembaga penyiaran TV dan radio.
	Provinsi Lampung	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di RS Daerah serta Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none">• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Lampung pada Kab/Kota:<ul style="list-style-type: none">○ Tulang Bawang Barat○ Tanggamus○ Mesuji

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Kep. Riau

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan
Bergizi Gratis

11

Jumlah
PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam,
- ❖ Kawasan Perkotaan Tanjungpinang
- ❖ KPBPB Bintan,
- ❖ Kawasan Perkotaan Tanjungbalai Karimun dan KPBPB Karimun
- ❖ Kawasan Afirmasi Natuna
- ❖ Kawasan Afirmasi Anambas
- ❖ Kawasan Afirmasi Lingga

21 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas;
A2	Batam dan KPBPB	
A3	Batam (A1), Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Bintan (A2), dan Kawasan Perkotaan Tanjungbalai Karimun dan KPBPB Karimun (A3) (sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Kepulauan Riau) <ul style="list-style-type: none">• Kota Batam• Kota Tanjungpinang• Kab. Bintan• Kab. Karimun	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping – WNTS;• Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> pada RSAL dr. Midiyato Suratani (Kota Tanjungpinang);• Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau;• Optimalisasi SPAM Pulau Nipah;• Pembangunan Prasarana Air Baku DAS Kawal;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Maritim Raja Ali Haji Ali melalui pembiayaan SBSN;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kepulauan Riau melalui pembiayaan SBSN;• Pendampingan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lokasi Bandara Bintan;• Pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate dan KEK Galang Batang;• Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri;• Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); • Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City; • Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Sauh – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pengembangan Kawasan Industri Pulau Ladi – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja <i>Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park</i> (GESEIP) – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa – Proyek Strategis Nasional (PSN); • Pengembangan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam – Proyek Strategis Nasional (PSN).
C1	Kawasan Swasembada Energi Natuna <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada <i>West Natuna Basin (producing basin)</i>; • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada <i>East Natuna Basin (discovery basin)</i>; • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada <i>South Natuna Basin (unexplored basin)</i>.
D1	Kawasan Afirmasi Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D2	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Lingga 	<p>perdesaan, serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 3 (tiga) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit: 1 (satu) fasilitas yang dilaksanakan oleh badan usaha di Lingga Kepulauan Riau.
	<p>Kepulauan Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan serta PKS N dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Natuna • Kab. Kepulauan Anambas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan); • Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai; • Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi serta Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai di PKS N Perbatasan Prioritas Ranai; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kab. Natuna dan Kab. Kepl. Anambas.
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fasilitasi dan kerjasama dalam perlindungan, dan pengembangan warisan budaya;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Aparatur Digital;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pers dan media massa melalui pelaksanaan pelatihan dan capacity building kepada wartawan untuk meningkatkan literasi media masyarakat dan kualitas komunikasi dan informasi publik dengan tujuan mempercepat pembangunan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan;
	Provinsi Kepulauan Riau	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita , • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan, • Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); • Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup
	Provinsi Kepulauan Riau	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)• Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Kepulauan Riau	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan surveillans kualitas air minum;• Kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan layanan dasar 13 kecamatan perbatasan prioritas di Kab. Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.
	Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah
	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di RS Daerah serta Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan
	Provinsi Kepulauan Riau	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> dengan <i>output</i> Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra- <i>stunting</i> , pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);
	Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none">• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Kepulauan Riau pada Kab/Kota:<ul style="list-style-type: none">○ Karimun○ Lingga○ Bintan○ Kepulauan Anambas
	Provinsi Kepulauan Riau	<p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia;• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi <i>Startup</i> Digital;• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Kepulauan Riau	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan;• Pembangunan unit sekolah baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan ternak ruminansia potong. <p>Upaya Pemenuhan Swasembada Pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan <i>input</i> dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jaringan Gas Kota;• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Kep. Bangka Belitung

Ringkasan Prioritas Nasional



2

Proyek
(highlight)

PN1



15

Proyek
(highlight)

PN2



10

Proyek
(highlight)

PN3



52

Proyek
(highlight)

PN4



30

Proyek
(highlight)

PN6



7

Proyek
(highlight)

PN8

*satu proyek dapat
mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



**Program Makan
Bergizi Gratis**

1

**Jumlah
PSN**

Lokasi Prioritas

11

- ❖ Kawasan Perkotaan Pangkalpinang
- ❖ Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat
- ❖ Kawasan Perkotaan Tanjungpandan
- ❖ KEK Tanjung Kelayang
- ❖ Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka-Belitung
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit, dan Lada Bangka
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Bangka Selatan
- ❖ Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT), Kab. Belitung Timur
- ❖ Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan
- ❖ Kawasan Konservasi TN Gunung Maras
- ❖ Kawasan Konservasi *Geopark* Belitung

31 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Dewan Nasional KEK
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Komdigi
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1 A2	Kawasan Perkotaan Pangkalpinang (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat (A2) <ul style="list-style-type: none"> • Kota Pangkalpinang • Kab. Bangka 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkalpinang dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat.
A3 A4 A5	Kawasan Perkotaan Tanjungpandan (A3), dan KEK Tanjung Kelayang A4) (sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka-Belitung (A5)) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur • Kota Pangkalpinang • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat • Kab. Bangka Selatan • Kab. Bangka Tengah 	Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata prioritas (DPP Bangka-Belitung), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Promosi Terpadu - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; • Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 1 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; • Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Tanjung Batu; • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Tanjungpandan; • Pengembangan KEK Tanjung Kelayang - Proyek Strategis Nasional (PSN).
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Timah,	Pengembangan komoditas unggulan timah, bauksit, dan lada Kepulauan Bangka Belitung terutama di Pulau Bangka yang meliputi Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Bauksit, dan Lada Bangka <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat • Kab. Bangka Tengah • Kab. Bangka Selatan 	Tengah, dan Kab. Bangka Selatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas perkebunan lada
C1	Kawasan Swasembada Pangan Bangka Selatan <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bangka Selatan 	Upaya Pemenuhan Swasembada Pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian; • Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
D1	Kawasan Afirmasi: Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> • D1: Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT), Kabupaten 	Pengembangan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT), Kabupaten Belitung Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
D2	Kawasan Afirmasi: Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> • D2: KT Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan 	Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Maras <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat 	Perlindungan dan pengamanan hutan.
E2	Kawasan Konservasi <i>Geopark</i> Belitung <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur 	Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan PLTS;• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;• Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Internalisasi nilai dan prinsip HAM dalam PUU dan kebijakan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Harmonisasi PUU untuk memastikan kesesuaian dengan nilai dan prinsip HAM serta memastikan tidak adanya diskriminasi;• Menghapus, mencabut, mengubah peraturan atau kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok khusus atau minoritas.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>pendidikan bangunan yang sudah mengalami kerusakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit sekolah baru; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Penuntasan TBC dan pengendalian penyakit menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan obat, bahan, alat, dan perbekalan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT); • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Melakukan penemuan aktif dan <i>Skринing mobile</i> penyakit menular; • Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta; • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV); • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC bagi masyarakat.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita; • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan; • Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi. <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri; • Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); • Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit; • Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM); • Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); • Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Peningkatan layanan RS berkualitas, dengan <i>output</i>:</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) di Rumah Sakit;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;• Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan. Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian;• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;• Akreditasi lembaga halal;• MoU kemitraan jaminan produk halal.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola dan pelebagaan PUG dalam proses pembangunan; • Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; • Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Peningkatan pengelolaan risiko bencana, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Fasilitas Pemerintah daerah dalam Peningkatan Kualitas Air (Prokasih);
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kab. Bangka Selatan
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> : talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi DKI Jakarta

Ringkasan Prioritas Nasional



7

Proyek
(highlight)



4

Proyek
(highlight)



29

Proyek
(highlight)



36

Proyek
(highlight)



2

Proyek
(highlight)



14

Proyek
(highlight)



2

Proyek
(highlight)

**satu proyek dapat mendukung beberapa PN*



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

28

Jumlah PSN

3

Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Aglomerasi Jakarta/Wilayah Metropolitan Jakarta
- ❖ Jakarta-Tangerang International Business Corridor
- ❖ Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism (North)

29 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
- ❖ Badan Penanggulangan Bencana Nasional
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta	Pengembangan Wilayah Metropolitan Aglomerasi Jakarta, dengan <i>output</i> :
A2		
A3	• Provinsi DKI Jakarta	• Layanan Angkutan Umum Massal di Wilayah Metropolitan Aglomerasi Jakarta;
A4	• Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur	• <i>Engineering Services of Jakarta Mass Rapid Transit</i> di East - West Line Project Phase I Stage II;
A5	• Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	• Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja;
		• Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg;
		• Pembangunan Simpang Tidak Sebidang;
		• Pengembangan infrastruktur transportasi;
		• Pembangunan Jaringan Perpipaan Distribusi Sistem DC Semanan Sistem Hilir SPAM Regional Karian Serpong;
		• Pembangunan Reservoir DC Semanan Sistem Hilir SPAM Regional Karian Serpong;
		• Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan.
		Pengembangan <i>Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area</i> , dengan <i>output</i> :
		• Persiapan Pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat Fase 1 Trase Tomang-Medan Satria;
		• Persiapan Pembangunan Jalan Tol Sawangan-Selabenda;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung);• Persiapan Pembangunan Jalan Tol <i>JORR Elevated</i> Cikunir-Ulujami;• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik <i>Jakarta Sewerage System</i>;• Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> di Kota Adm. Jakarta Timur pada RS Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa, Lembaga Biomedis Puskesad, dan Lembaga Peralatan Kesehatan Puskesad;• Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> di Kota Adm. Jakarta Pusat pada RSAL dr. MintoHardjo dan RSGM Ladokgi R. E. Martadinata;• Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis - Provinsi DKI Jakarta;• Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi;• Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;• Pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran;• Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu;• Pembangunan Ruas Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Ruas Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta; • Pembangunan Ruas Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta; • Persiapan pengembangan LRT Jabodebek.
A1	<p>Jakarta-Tangerang <i>International Business Corridor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan • Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang 	<p>Pengembangan <i>Jakarta-Tangerang International Business Corridor</i> sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif <i>Greater Jakarta</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota-Ancol Barat; • Persiapan Pembangunan MRT Lebakbulus-Serpong; • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai; • Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Grogol-Sunter-Kelapagading; • Pengembangan TOD Blok M, Dukuh Atas, dan Lebakbulus; • Pengembangan Ekosistem Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional; • Pembangunan Ruas Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta.
A2	<p><i>Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi DKI Jakarta: Kota 	<p>Pengembangan <i>Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism</i> sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif <i>Greater Jakarta</i>, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Adm. Jakarta Utara <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Banten: Kab. Tangerang • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta; • Pengembangan <i>New Priok Container Terminal Tahap 2 (NPCT2)</i> dan Tahap 3 (NPCT3); • Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/<i>New Priok Eastern Access (NPEA)</i>; • Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. <i>Section Harbour Road II</i> (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (<i>Elevated</i>)); • Pembangunan Ruas Jalan Tol Semanan-Sunter – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta; • Pembangunan Ruas Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta; • Sistem Layanan Integrasi Logistik Pelabuhan Tanjung Priok dengan Cikarang <i>Dry Port</i>; • Pengembangan Kawasan Ancol (Bagian <i>Northern Coast New Economic Corridor</i>); • Pengembangan Pelabuhan Perikanan Modern dan Industri Perikanan Terintegrasi PPS Nizam Zachman; • Pembangunan pengaman pantai Jakarta; • Pengembangan koridor industri Cilincing-Tarumajaya; • Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing.
E1	Kawasan Konservasi TN Kepulauan Seribu	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian kawasan konservasi TN Kepulauan Seribu secara terpadu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Adm. Kepulauan Seribu 	<p>melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu.
	Provinsi DKI Jakarta	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu;
	Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Provinsi DK Jakarta;
	Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Jaringan Gas Kota;
	Provinsi DKI Jakarta	<i>High Speed Railway</i> Jakarta – Bandung;
	Provinsi DKI Jakarta	Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu;
	Provinsi DKI Jakarta	Optimalisasi program Jakpreneur untuk mendukung pengembangan usaha berbasis komunitas dan kewirausahaan sosial di lingkungan perkotaan;
	Provinsi DKI Jakarta	Pengembangan <i>pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di daerah;
	Provinsi DKI Jakarta	Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Jakarta Timur;
	Provinsi DKI Jakarta	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi, dengan output pengembangan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi laut;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi DKI Jakarta	Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
	Provinsi DKI Jakarta	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi DKI Jakarta	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;• Penyediaan program skrining bayi baru lahir;• Penyediaan program pencegahan kanker leher rahim termasuk <i>di antaranya</i> dengan skrining dan vaksinasi HPV DNA.
	Provinsi DKI Jakarta	Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i> : penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	Provinsi DKI Jakarta	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM); • Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); • Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan. <p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i> penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.</p>
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> dengan <i>output</i> pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</p>
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita; • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan; • Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri <i>Neonatal</i> Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri <i>Neonatal</i> Emergensi Dasar (PONED); • Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>: skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri, serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</p>
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV).
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Investasi pelayanan kesehatan primer;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;• Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Penguatan Pers dan Media Massa, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pelatihan bidang jurnalistik;• Pelaksanaan pelatihan SDM bidang penyiaran.
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi DKI Jakarta	<p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia;• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi <i>Startup Digital</i>;• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi DKI Jakarta	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regeneratif <i>Greater Jakarta</i> , dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pendukung <i>Event</i> MICE Dalam Negeri;• Penguatan Jejaring Pengembangan Produk Pariwisata.
	Provinsi DKI Jakarta	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaSan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Jawa Barat

Ringkasan Prioritas Nasional



46

PN2
Proyek
(highlight)



50

PN3
Proyek
(highlight)



55

PN4
Proyek
(highlight)



1

PN5
Proyek
(highlight)



27

PN6
Proyek
(highlight)



5

PN8
Proyek
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



5 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sampah



**Program Makan
Bergizi Gratis**

39

**Jumlah
PSN**

Lokasi Prioritas



- ❖ WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung, Kawasan Pariwisata Unggulan Bandung dan Sekitarnya
- ❖ Kawasan Perkotaan Tasikmalaya
- ❖ Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang, Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur-Purwakarta-Subang
- ❖ Kawasan Perkotaan Depok
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung
- ❖ Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat

35 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Riset Inovasi Nasional
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

Provinsi Jawa Barat

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	WM Bandung <ul style="list-style-type: none">• Kota Bandung• Kab. Bandung• Kab. Bandung Barat• Kota Cimahi• Kab. Sumedang	Pengembangan Kawasan WM Bandung, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan persiapan pembangunan LRT Bandung;• Pembangunan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di Perkotaan Bandung;• Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung;• Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;• Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya;• Peningkatan sarana dan pengembangan kapasitas penelitian SDM STP di Institut Teknologi Bandung melalui pembiayaan PHLN;• Perencanaan pembangunan pipa gas bumi Cikampek–Bandung;• Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> pada RS Tk. II Dustira (Kota Cimahi), Lembaga Farmasi Puskesmas (Kota Bandung), Lembaga Biologi Vaksin Puskesmas (Kota Bandung);• Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap III (Pembangunan Stasiun Cimindi Andir dan Ciroyom antara Padalarang - Bandung);• Fasilitas pengelolaan sampah spesifik di Kota Bandung;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Bandung; • Pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap; • Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan; • Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: <ul style="list-style-type: none"> a. North - South Link Bandung; b. Bandung Inter Urban Toll Road. • Pembangunan <i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung; • Pengembangan Jalan Akses Exit Tol Jalan Tol Padalarang - Cileunyi (KM 151); • Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan.
A1	Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bandung • Kab. Bandung • Kab. Bandung Barat • Kota Cimahi • Kab. Sumedang 	Pengembangan Ekosistem Kawasan Industri Cekungan Bandung, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri nikel, industri timah, industri kelapa, industri dirgantara, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil, alas kaki dan produk tekstil); • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung; • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A2	<p>Kawasan Pariwisata Unggulan Bandung dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none">• Kota Bandung• Kab. Bandung• Kab. Bandung Barat• Kota Cimahi• Kab. Sumedang	<p>Pengembangan kawasan pariwisata unggulan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Penguatan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Tangkuban Parahu dan Rancaupas-Pangalengan;• <i>Urban Renewal</i> pada kota-kota wisata, antara lain: Lembang dan Ciwidey;• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal. <p>Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Artefak Gua Pawon dan Geowisata Kabupaten Bandung Barat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan;• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
A3	<p>Kawasan Perkotaan Tasikmalaya</p> <ul style="list-style-type: none">• Kota Tasikmalaya	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Tasikmalaya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya;• Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya;• Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap; • Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang.
A4	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bekasi • Kab. Bekasi • Kab. Bogor • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Subang 	Pengembangan Ekosistem Kawasan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan; • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban; • Pembangunan Pelabuhan Patimban; • Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Jatiluhur I; • Perluasan SPAM - Perluasan Jaringan Distribusi SPAM Regional Jatiluhur I Kab. Karawang; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> pada RSAU dr. Hoedijono (Kab. Subang); • Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di Cikampek; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Singaperbangsa Karawang melalui pembiayaan SBSN; • Pengendalian banjir Kali Bekasi; • Pengendalian Banjir Kab. Karawang; • Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan di Kab Karawang; • Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Bekasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 149 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung; • Pembangunan Jalan Tol Cinere – Jagorawi; • Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing; • Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu; • Pembangunan Angkutan Umum Masal Perkotaan Jabodetabek <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta <i>East - West Phase I</i>; • Pengembangan Jalan Akses <i>Exit</i> Tol Jalan Tol Jakarta-Cikampek (KM 1+842); • Pengembangan Jalan Akses <i>Exit</i> Tol Jalan Tol Jakarta-Cikampek (KM 42+000); • Pengembangan Jalan Akses <i>Exit</i> Tol Jalan Joyo Martono Bekasi; • Pengembangan Kawasan Industri Patimban <i>Industrial Estate</i>; • Pengembangan KEK Lido; • Pembangunan Bahan Bakar Hijau : Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek.
A5	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bogor • Kab. Bogor • Kota Sukabumi • Kab. Sukabumi 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Bogor – Sukabumi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi – Ciranjang - Padalarang; • Pembangunan Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i>; • Pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong (via Parung);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan SPAM - Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM IKK Cipaku Kota Bogor; • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM STP di Institut Pertanian Bogor melalui pembiayaan PHLN; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL) Kota Bogor; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (IPLT) Kota Bogor.
A5	<p>Kawasan Pariwisata Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bogor • Kab. Bogor • Kota Sukabumi • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur 	<p>Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan Bogor – Sukabumi – Cianjur, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penguatan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang; • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan KEK Lido. <p>Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti, Kabupaten Sukabumi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A6	Kawasan Perkotaan Depok <ul style="list-style-type: none"> • Kota Depok 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa. Pengembangan Kawasan Perkotaan Depok, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Akses Sempul Transportasi di CILODONG/BTS. DEPOK - BTS. KOTA BOGOR; • Preservasi Jalan Akses Sempul Transportasi BTS.DKI/BANTEN GANDARIA/BTS.DEPOK/ TANGERANG (CIPUTAT - BOGOR); • Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII); • Peningkatan sarana, prasarana dan pengembangan kapasitas penelitian dan SDM STP di Universitas Indonesia melalui pembiayaan PHLN; • Persiapan pengembangan LRT Jabodebek; • Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung; • Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok – Antasari; • Pembangunan Jalan Tol Cinere – Jagorawi; • Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere; • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Depok.
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Cirebon • Kab. Indramayu 	Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Kejawanan; • Pembangunan prasarana perlindungan kawasan pantai utara jawa di Kab. Indramayu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C1	<p>Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Bekasi• Kab. Karawang• Kab. Purwakarta• Kab. Bandung Barat• Kab. Bandung• Kab. Subang• Kab. Indramayu• Kab. Sumedang• Kab. Cirebon• Kab. Kuningan• Kab. Majalengka	<p>Penguatan kemandirian kawasan sebagai langkah menuju swasembada pangan, air, dan energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat pada D. I. Rentang;• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat pada D. I. Jatiluhur;• Pembangunan Prasarana Air Baku Kertasari;• Rehabilitasi Bendung Cariang;• Revitalisasi sentra/kluster komoditas unggulan air payau di pantai utara;• RDMP RU VI Balongan (<i>Rescoping</i>);• Alat dan mesin pertanian;• Pembangunan Bendungan Kuningan;• Pembangunan Bendungan Cipanas;• Pembangunan Bendungan Sadawarna;• Pembangunan Tanggul Pantai;• Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi: Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu);• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;• Pengembangan komoditas hortikultura;• Pengembangan ternak ruminansia potong;• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat <ul style="list-style-type: none">• Kab. Bogor• Kab. Sukabumi• Kab. Cianjur	Penguatan kemandirian kawasan sebagai langkah menuju swasembada air, dan energi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment area</i>, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri, DAS Cibuni;• Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara pada DAS Cisadane dan DAS Ciliwung;• Pembangunan Bendungan Cibeet;• Pembangunan Bendungan Cijurey;• Pembangunan PLTM Kertamukti;• Pembangunan infrastruktur PLTP Gunung Salak VII;• Pembangunan Bendungan Ciawi;• Pembangunan Bendungan Sukamahi;• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;• Pengembangan komoditas hortikultura;• Pengembangan ternak ruminansia potong;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
D1	Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan (Pemerataan Pembangunan) <ul style="list-style-type: none">• Kab. Garut• Kab. Tasikmalaya• Kab. Cianjur	Pembangunan sarana prasarana kawasan afirmasi untuk mendukung bidang pariwisata, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Penguatan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti;• Preservasi Jalan Lintas Selatan Jawa Barat;• Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Garut;• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;• Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir. Pembangunan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi, Kab. Garut, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat	Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
	Provinsi Jawa Barat	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; • Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia; • Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi <i>Startup Digital</i>; • Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi Jawa Barat	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Jawa Barat	Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC;• Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat.
	Provinsi Jawa Barat	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.
	Provinsi Jawa Barat	Mengembangkan <i>pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di daerah;
	Provinsi Jawa Barat	Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, dengan <i>output</i> pembangunan infrastruktur PLTA PS Matenggeng, PLTP, dan PLTS Apung;



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 157 -**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Barat	Sertifikasi produk dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;
	Provinsi Jawa Barat	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;
	Provinsi Jawa Barat	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan kawasan pesisir di Kuningan;
	Provinsi Jawa Barat	Pembangunan SPAM - Pembangunan SPAM Cilongkrang Kap. 40 Liter/detik Kab. Majalengka;
	Provinsi Jawa Barat	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penataan aset dan akses dengan <i>output</i> GTRA; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dengan <i>output</i> data dan informasi IP4T; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Identifikasi kebutuhan bantuan pemberdayaan untuk mengolah tanah dengan <i>output</i> akses Reforma Agraria.
	Provinsi Jawa Barat	<p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan; • Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Barat	<p>Peningkatan SDM pada bidang pendidikan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru; • Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran; • Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja.
	Provinsi Jawa Barat	Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
	Provinsi Jawa Barat	Peningkatan kapasitas dan pengembangan sarana penunjang pelatihan SDM transportasi;
	Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Jaringan Gas Kota;
	Provinsi Jawa Barat	<i>Double Track</i> Jawa Selatan;
	Provinsi Jawa Barat	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> dengan <i>output</i> Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);
	Provinsi Jawa Barat	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita; • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan; • Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri <i>Neonatal</i> Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Barat	<p>Obstetri <i>Neonatal</i> Emergensi Dasar (PONED);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi. <p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i> daerah yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7];</p>
	Provinsi Jawa Barat	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM;</p>
	Provinsi Jawa Barat	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia; • Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri; • Serta peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Jawa Barat	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah; • Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota. <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Jawa Barat	<p>Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Bandung;• Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Bandung;</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Purwakarta;• Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Karawang;• Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Cimahi;• Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Bekasi.
	Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi D.I Yogyakarta

Ringkasan Prioritas Nasional

 **7**
PN2 *Proyek*
(highlight)

 **10**
PN3 *Proyek*
(highlight)

 **35**
PN4 *Proyek*
(highlight)

 **3**
PN6 *Proyek*
(highlight)

 **16**
PN8 *Proyek*
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

4

Jumlah PSN



Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- ❖ Kawasan Pariwisata Unggulan Yogyakarta
- ❖ Kawasan Aerotropolis YIA (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur - Yogyakarta - Prambanan)
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Progo - Opak
- ❖ Kawasan Konservasi TN Gunung Merbabu dan TN Gunung Merapi
- ❖ Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan)
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D.I Yogyakarta

27 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kemenko Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Permukiman
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (A1), Kawasan Pariwisata Unggulan Yogyakarta (A2), dan Kawasan Aerotropolis YIA (A3) (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) <ul style="list-style-type: none">• Kota Yogyakarta• Kab. Sleman• Kab. Kulonprogo• Kab. Gunungkidul• Kab. Bantul	Pengembangan Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata Unggulan, dan Kawasan Aerotropolis YIA di Provinsi D.I Yogyakarta dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi SPAM Akademi Angkatan Udara Kab. Sleman;• Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;• <i>Urban Renewal</i> Kota Tua Yogyakarta, dan Kotagede;• Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta-Bantul-Parangtritis, Yogyakarta-Kaliurang, Yogyakarta-Wonosari;• Pembangunan Groundsill Srandakan Sungai Progo;• Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Kulonprogo (YIA);• Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo.
C1	Kawasan Swasembada Pangan Progo-Opak <ul style="list-style-type: none">• Kab. Sleman• Kab. Kulonprogo• Kab. Gunungkidul• Kab. Bantul	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Progo-Opak dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura;• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;• Pengembangan komoditas hortikultura;• Pengembangan ternak ruminansia potong;• Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan, Infeksi Baru, dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (<i>One Health</i>).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D1	<p>Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Gunungkidul 	<p>Pengembangan Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan 6A pariwisata di Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul; • Pembangunan Jalan Kretek Girijati.
E1	<p>Kawasan Konservasi TN Gunung Merbabu dan TN Gunung Merapi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Sleman 	<p>Pengembangan Kawasan Konservasi TN Gunung Merbabu dan TN Gunung Merapi dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri.
	<p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D. I. Yogyakarta</p>	<p>Penguatan Mitigasi Risiko Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D.I. Yogyakarta dengan <i>output</i> Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul.</p>
	<p>Provinsi D.I. Yogyakarta</p>	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita; • Kualitas dan layanan KB pasca persalinan; • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan Skrining Penyakit dan Faktor Risiko Penyakit;• Peningkatan Layanan dan Kapasitas Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik Memenuhi Ketentuan.
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemecuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care (ANC)</i> , tata laksana bagi ibu dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi D.I. Yogyakarta	<p>balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</p> <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perkawinan.
	Provinsi D.I. Yogyakarta	<p>Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang;• Pembangunan Unit Sekolah Baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi D.I. Yogyakarta	<p>Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</p> <p>Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk;• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha dalam rangka Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk;• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Akreditasi lembaga halal;• MoU kemitraan jaminan produk halal.
	Provinsi D.I. Yogyakarta	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;• Pelatihan terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP-7);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi D.I. Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;• Pengembangan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu Anak;• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan dalam mendukung RS Lengkap Berkualitas. <p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi Startup Gim Indonesia;• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi Startup Digital;• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Pelatihan vokasi di Provinsi DI Yogyakarta – Kota Yogyakarta;
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Peningkatan sarana dan pengembang kapasitas penelitian dan SDM STP di Universitas Gadjah Mada melalui pembiayaan PHLN;
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu;
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> : talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan;
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Jawa Tengah

Ringkasan Prioritas Nasional



4
PN1
Proyek
(highlight)



81
PN2
Proyek
(highlight)



24
PN3
Proyek
(highlight)



63
PN4
Proyek
(highlight)



14
PN5
Proyek
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



32
PN6
Proyek
(highlight)



4
PN7
Proyek
(highlight)



27
PN8
Proyek
(highlight)



5 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sampah



Program Makan Bergizi Gratis



20
Jumlah
PSN



Lokasi Prioritas



- ❖ WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus
- ❖ Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang (termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITE)/ KEK Industropolis Batang)
- ❖ Kawasan Perkotaan Surakarta dan Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo
- ❖ Kawasan Pariwisata Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar
- ❖ Kawasan Perkotaan Banyumas (Purwokerto)
- ❖ Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap
- ❖ Kawasan Perkotaan Rembang
- ❖ Kawasan Pariwisata Borobudur-Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan)
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas (Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso (Kab. Karanganyar); Kawasan Perdesaan Margomarem (Kab. Wonosobo); Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal))
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap
- ❖ Kawasan Konservasi Taman Nasional Merbabu-Merapi
- ❖ Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa
- ❖ Kawasan Konservasi Geopark Kebumen

36 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Permukiman
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Hukum dan HAM
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Provinsi Jawa Tengah

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A5	WM Semarang <ul style="list-style-type: none">• Kota Semarang• Kota Salatiga• Kab. Semarang• Kab. Kendal• Kab. Demak• Kab. Grobogan	Pengembangan Wilayah Metropolitan Semarang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;• Pembangunan prasarana perlindungan kawasan pantai utara jawa di Kab. Demak;• Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis Kota Semarang;• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL) Kota Semarang;• Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Semarang;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Islam Negeri Salatiga melalui pembiayaan SBSN;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Islam Negeri Wali Songo melalui pembiayaan SBSN;• Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan.
	Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus <ul style="list-style-type: none">• Kota Semarang• Kab. Kendal• Kab. Demak• Kab. Kudus	Penguatan ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri Seafer; • Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri; • Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri; • Fasilitasi Percepatan Perizinan Berusaha Kawasan Industri RPJMN.
A4	<p>Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Pekalongan • Kab. Pekalongan • Kab. Batang 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu); • Pengembangan kota agropolitan Pekalongan; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid (Pekalongan) melalui pembiayaan SBSN.
	<p>Kawasan Pengembangan Industri Batang (termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)/ KEK Industropolis Batang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Pekalongan • Kab. Pekalongan • Kab. Batang 	<p>Penguatan ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Batang (termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)/ KEK Industropolis Batang), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel); • Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Batang; • Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri wilayah; • Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri; • Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri; • Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri RPJMN.
A6 A7	Kawasan Perkotaan Surakarta (A6) <ul style="list-style-type: none"> • Kota Surakarta • Kab. Boyolali • Kab. Karanganyar • Kab. Sukoharjo 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Surakarta, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo; • Pengembangan kota agropolitan Surakarta; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) Kota Surakarta; • Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Sungai Bengawan Solo Jebres; • <i>Urban Renewal</i> Kota Tua Surakarta; • Penyediaan layanan KA commuter line Surakarta Raya (Surakarta-Sukoharjo-Karanganyar-Sragen).
	Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo (A6) <ul style="list-style-type: none"> • Kota Surakarta • Kab. Boyolali 	Penguatan ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan koridor industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, dan industri tekstil dan alas kaki);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Karanganyar • Kab. Sukoharjo 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri wilayah.
	<p>Kawasan Pariwisata Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar (A7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Surakarta • Kab. Sragen • Kab. Karanganyar 	<p>Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar dengan <i>output</i> peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata, antara lain: Sangiran, Tawangmangu, Cetho-Sukuh.</p>
A1	<p>Kawasan Perkotaan Banyumas (Purwokerto)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Banyumas 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Banyumas (Purwokerto), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kota agropolitan Purwokerto; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Jenderal Soedirman melalui pembiayaan SBSN.
A3	<p>Kawasan Perkotaan Cilacap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Cilacap 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Cilacap, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kota agropolitan Cilacap; • Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Cilacap melalui pembiayaan SBSN.
	<p>Kawasan Pengembangan Industri Cilacap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Cilacap 	<p>Pengembangan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Green Refinery</i> RU IV Cilacap, Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap; • Pengembangan koridor industri Cilacap (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		semen dan bahan konstruksi, industri makanan dan minuman).
A8	Kawasan Perkotaan Rembang <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Rembang 	Pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang, dengan <i>output</i> pengembangan kota agropolitan Rembang.
A2	Kawasan Pariwisata Borobudur-Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) <ul style="list-style-type: none"> • Kota Magelang • Kab. Magelang • Kab. Wonosobo • Kab. Temanggung • Kab. Banjarnegara • Kab. Klaten 	Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur-Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur; • Peningkatan 6A Pariwisata, antara lain pada Dataran Tinggi Dieng dan Kompleks Percandian Dieng dan Museum Kaliasa; • <i>Urban Renewal</i> Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung; • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> pada RST Tk. II dr. Soedjono (Kota Magelang).
C3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Semarang • Kab. Demak • Kab. Jepara • Kab. Kudus 	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bendungan Karangnongko; • Pembangunan Bendungan Cabean; • Pembangunan Bendungan Jragung; • Pembangunan Bendungan Randugunting;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Kab. Pati• Kab. Grobogan• Kab. Blora• Kab. Rembang• Kab. Kendal• Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Glapan;• Pengembangan SPAM Semarang Barat;• Pembangunan prasarana perlindungan kawasan pantai utara jawa di Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Kudus;• Meningkatkan produktivitas lahan pertanian;• Mencetak lahan pertanian;• Alat dan mesin pertanian;• Penguatan karantina hewan mendukung pengembangan pangan hewani;• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;• Pengembangan komoditas hortikultura;• Pengembangan ternak ruminansia potong;• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;• Peningkatan Infrastruktur Budidaya Udang – IISAP di Kabupaten Jepara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C2	<p>Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Wonosobo• Kab. Banjarnegara• Kab. Purbalingga• Kab. Banyumas• Kab. Cilacap• Kab. Kebumen• Kab. Purworejo• Kab. Magelang• Kab. Temanggung	<p>Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain D. I. Serayu dan D. I. Manganti;• Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Bendung Wanganaji dan Bendung Gerak Serayu;• Pembangunan Bendungan Bener;• Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa;• Meningkatkan produktivitas lahan pertanian;• Mencetak lahan pertanian;• Alat dan mesin pertanian;• Penguatan karantina hewan mendukung pengembangan pangan hewani;• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;• Pengembangan komoditas hortikultura;• Pengembangan ternak ruminansia potong;• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Brebes • Kab. Tegal • Kab. Pemalang • Kab. Pekalongan • Kab. Batang 	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Kumisik; • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Mencetak lahan pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Penguatan karantina hewan mendukung pengembangan pangan hewani; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C4	<p>Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Blora • Kab. Sragen • Kab. Boyolali • Kab. Klaten • Kab. Sukoharjo • Kab. Karanganyar • Kab. Wonogiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; • Pembangunan prasarana perlindungan kawasan pantai utara jawa di Kab. Brebes. <p>Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Bendung Colo; • Pembangunan SPAM - Pembangunan IPA Kap. 100 Liter/detik SPAM Waduk Gondang Kab. Sragen; • Pengembangan SPAM Regional Wosusokas; • Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Wosusokas; • Perluasan SPAM - Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Regional Wosusokas; • Perluasan SPAM - Pembangunan Reservoir, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Regional Wosusokas Kab. Wonogiri; • Perluasan SPAM - Pembangunan Reservoir, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Regional Wosusokas Kab. Sukoharjo; • Pembangunan Bendungan Pidekso;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bendungan Jlantah; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Mencetak lahan pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Penguatan karantina hewan mendukung pengembangan pangan hewani; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Cilacap 	Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap, dengan <i>output</i> pengembangan pelabuhan perikanan PPS Cilacap.
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas	Pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso (Kab. Karanganyar) • Kawasan Perdesaan Margomarem (Kab. Wonosobo) • Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
E1	Kawasan Konservasi TN Merbabu-Merapi <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Magelang • Kab. Boyolali • Kab. Semarang 	Pengembangan Kawasan Konservasi TN Merbabu-Merapi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; • Perlindungan dan pengamanan hutan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
E2	Kawasan Konservasi TN Karimunjawa <ul style="list-style-type: none">Kab. Jepara	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi. Pengembangan Kawasan Konservasi TN Karimunjawa, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik;Perlindungan dan pengamanan hutan.
E3	Kawasan Konservasi Geopark Kebumen <ul style="list-style-type: none">Kab. Kebumen	Pengembangan Kawasan Konservasi Geopark Kebumen, dengan <i>output</i> peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
	Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan untuk bangunan yang sudah mengalami kerusakan;Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Penurunan kematian ibu dan anak dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;• Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana;• Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba;• Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan; • Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.
	Provinsi Jawa Tengah	Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i> penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); • Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit; • Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM); • Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); • Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Jawa Tengah	Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> , dengan <i>output</i> pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra- <i>stunting</i> , pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);
	Provinsi Jawa Tengah	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan. <p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Melakukan penemuan aktif dan skrining <i>mobile</i> penyakit menular (TBC, kusta, HIV/AIDS, filariasis, frambusia);• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV);• Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat.
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kab/Kota, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit.
	Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan. <p>Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (PLTM);• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;• Penerapan jaringan cerdas (<i>smart grid</i>) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi;• Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik;• Penerapan <i>Internet of Things</i> (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara <i>real-time</i>;• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;• Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);• Percepatan konversi BBM ke BBG.
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Pengembangan infrastruktur digital, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;• Perluasan layanan penyiaran digital.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan;• Pelestarian Cagar Budaya, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);• <i>Event film</i>, musik, dan seni;• Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;• Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;• Pelindungan dan pelestarian warisan budaya;• Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Pengelolaan hutan secara lestari, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produktivitas hasil kehutanan melalui Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);• Pengembangan produk melalui agroforestri;• Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;• Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan.
	Provinsi Jawa Tengah	<p>Penguatan ekonomi syariah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Industri dan UMKM Halal;• Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional;• Penguatan Ekosistem Halal;• Penguatan Keuangan Syariah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Dana Sosial Syariah. Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;• Pendidikan HAM bagi K/L/D.
	Provinsi Jawa Tengah	Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal.
	Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Jawa Tengah	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi Startup Gim Indonesia; • Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi Startup Digital; • Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi, dengan <i>output</i> pengembangan pendidikan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi darat dan laut;
	Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
	Provinsi Jawa Tengah	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;
	Provinsi Jawa Tengah	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;
	Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Kudus melalui pembiayaan SBSN;
	Provinsi Jawa Tengah	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP);
	Provinsi Jawa Tengah	<i>Double Track</i> Jawa Selatan;
	Provinsi Jawa Tengah	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu;
	Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Jawa Tengah	<p>yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan;</p> <p>Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Temanggung;• Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Rembang.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Jawa Timur

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

18

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ WM Surabaya & Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan (termasuk KEK Gresik dan Kl i-Sentra @Lamongan)
- ❖ Kawasan Perkotaan Malang-Batu dan Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang (termasuk KEK Singhasari)
- ❖ Kawasan Perkotaan Kediri
- ❖ Kawasan Perkotaan Madiun
- ❖ Kawasan Perkotaan Sumenep
- ❖ Kawasan Perkotaan Jember
- ❖ Kawasan Pengembangan Industri Ngawi
- ❖ Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo
- ❖ Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas
- ❖ Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda
- ❖ Kawasan Afirmasi Madura dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
- ❖ Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan)
- ❖ Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru
- ❖ Kawasan Konservasi TN Meru Betiri
- ❖ Kawasan Konservasi TN Alas Purwo
- ❖ Kawasan Konservasi TN Bahuran
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrowisata Pertanian Terpadu

36 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Provinsi Jawa Timur

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Wilayah Metropolitan Surabaya <ul style="list-style-type: none">• Kota Surabaya• Kab. Gresik• Kab. Lamongan• Kab. Mojokerto• Kota Mojokerto• Kab. Sidoarjo• Kab. Bangkalan	Pengembangan Wilayah Metropolitan Surabaya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gresik–Lamongan–Tuban;• Pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar;• Pembangunan Jalur Ganda KA Segmen Sepanjang–Wonokromo;• Pembangunan Prasarana Air Baku Bendung Gerak Sembayat;• Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya <i>Waterfront Land</i> (SWL);• <i>Surabaya Regional Railway Line</i> (Phase I);• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kab. Gresik;• Pembangunan Sarana dan Prasarana STP Institut Teknologi Sepuluh Nopember, serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM melalui pembiayaan PHLN;• Pembangunan Sistem Distribusi SPAM Regional Umbulan;• Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan.
A1	Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan (Termasuk Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Gresik dan Kawasan Industri [KI] i-Sentra @Lamongan) <ul style="list-style-type: none">• Kota Surabaya• Kab. Gresik	Penguatan Ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan koridor industri Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi sawit, industri tekstil dan produk tekstil, industri kimia, industri kosmetik dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan 	<p>farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik; • Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh Badan Usaha di Kabupaten Gresik; • Pembangunan Pabrik Amonia Urea III Petrokimia Gresik (PKG); • Pembangunan Pabrik Soda Ash Petrokimia Gresik (PKG); • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi; • Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; • Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan; • Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang; • Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri; • Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri; • Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo; • Pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar; • Pembangunan Sistem Distribusi SPAM Regional Umbulan.
A2	<p>Kawasan Perkotaan Malang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Malang • Kota Batu • Kab. Malang 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Malang, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Malang melalui pembiayaan SBSN;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Brawijaya melalui pembiayaan PHLN;• Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang.
A2	Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang (termasuk KEK Singhasari) <ul style="list-style-type: none">• Kota Malang• Kab. Malang• Kota Batu	Penguatan Ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan koridor industri Malang-Singasari-Lawang (sektor industri prioritas: Industri tekstil dan produk tekstil);• Pembangunan dan Pengembangan KEK Singhasari;• Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang.
A3	Kawasan Perkotaan Kediri <ul style="list-style-type: none">• Kota Kediri• Kab. Kediri• Kota Blitar• Kab. Blitar• Kab. Tulungagung	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kediri, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud;• Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri.
A4	Kawasan Perkotaan Madiun <ul style="list-style-type: none">• Kota Madiun• Kab. Madiun• Kab. Magetan	Pengembangan Kawasan Perkotaan Madiun, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan <i>biodefense</i> pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan);• Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madiun melalui pembiayaan SBSN.
A6	Kawasan Perkotaan Jember <ul style="list-style-type: none">• Kab. Jember	Pengembangan Kawasan Perkotaan Jember, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan persiapan reaktivasi jalur KA segmen Kalisat-Situbondo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A7	Kawasan Pengembangan Industri Ngawi <ul style="list-style-type: none">Kab. Ngawi	<ul style="list-style-type: none">Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul. Penguatan Ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Ngawi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri;Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri.
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur <ul style="list-style-type: none">Kab. PacitanKab. PonorogoKab. MagetanKab. MadiunKab. NgawiKab. BojonegoroKab. TubanKab. LamonganKab. Gresik	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa di Kab. Pacitan;Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara di Bendung Babat, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas Sidomoro;Pembangunan Bendungan Bendo;Pembangunan Bendungan Gongseng;Pembangunan Bendungan Karangnongko;Pembangunan Kilang Minyak Tuban (Ekspansi);Pembangunan kilang olefin di Tuban;Pengembangan <i>Biofuel</i> dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro;Penyiapan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik;Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri;Preservasi BTS. Kab. Tuban - Widang, Sadang (BTS. Kab. Lamongan) - BTS. Kota Gresik;Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;Mencetak Lahan Pertanian;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Alat dan mesin pertanian; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Penyediaan input dan sarana prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Nganjuk • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Tulungagung • Kab. Trenggalek 	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I. Siman, D. I. Mrican, D. I. Is Molek, dan D. I. Waduk Bening; • Pembangunan Bendungan Bagong; • Pembangunan Bendungan Tugu; • Pembangunan Bendungan Semantok; • Rehabilitasi Bendung Jatimlerek; • Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian; • Mencetak Lahan Pertanian; • Alat dan mesin pertanian; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura; • Pengembangan ternak ruminansia potong;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan input dan sarana prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;• Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur;• Pembangunan SPAM Dieng Kabupaten Malang.
C3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda <ul style="list-style-type: none">• Kab. Pasuruan• Kab. Probolinggo• Kab. Lumajang• Kab. Jember• Kab. Situbondo• Kab. Bondowoso• Kab. Banyuwangi	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bondoyudo, D. I. Pondok Waluh, D. I. Talang;• Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi;• Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo;• Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur;• Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;• Mencetak Lahan Pertanian;• Alat dan mesin pertanian;• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas hortikultura; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Penyediaan input dan sarana prasarana pertanian; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Banyuwangi melalui pembiayaan SBSN; • Peningkatan Infrastruktur Budidaya Udang – IISAP di Kabupaten Situbondo.
A5 D1	Kawasan Afirmasi Madura (D1) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep (A5) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bangkalan • Kab. Sampang • Kab. Pamekasan • Kab. Sumenep 	Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Afirmasi Madura dan Kepulauan serta Kawasan Perkotaan Sumenep untuk mendukung Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Replacement</i> fasilitas Pelabuhan Sapudi; • Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM - Optimalisasi SPAM Gili Iyang Tahap II;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Madura melalui pembiayaan SBSN; • Bantuan Operasional RS Kapal di Kab. Sumenep.
D1	Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek 	Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur untuk mendukung Pemerataan Pembangunan, dengan <i>output</i> Pembangunan IPA Kap 50 Liter/detik SPAM Waduk Tukul Kab. Pacitan.
D2	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang, Kab. Mojokerto	Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
E1	Kawasan Konservasi	Pengelolaan hutan secara lestari, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah; • Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH; • Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH; • Pengamanan Kawasan Hutan; • Penanganan aduan atas usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan; • Pengembangan Hutan Adat.
E2	TN Bromo-Tengger-Semeru (E1)	
E3	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Malang • Kab. Lumajang 	
E4	Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Jember • Kab. Banyuwangi 	
	Kawasan Konservasi TN Alas Purwo (E3) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Banyuwangi 	
	Kawasan Konservasi Baluran (E4) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Situbondo 	
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur	Penguatan Mitigasi Risiko Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur dengan <i>output</i> Retrofit atau Penguatan Infrastruktur Publik berketahanan Seismisk di Kota Blitar.
	Provinsi Jawa Timur	Pengembangan Sarana dan Prasarana, Perluasan Akses Pendidikan Sektor Strategis, dan Penguatan Sumber Daya Manusia, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan untuk bangunan yang sudah mengalami kerusakan; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 202 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Timur	<p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;• Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan;• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) – Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Jawa Timur	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
	Provinsi Jawa Timur	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Jawa Timur	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> dengan <i>output</i> pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra- <i>stunting</i> , pemenuhan air minum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Timur	<p>sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</p> <p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan;• Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;• Akreditasi lembaga halal;• MoU kemitraan jaminan produk halal.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Melakukan penemuan aktif dan skrining <i>mobile</i> penyakit menular (kusta, HIV/AIDS, filariasis, frambusia);• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV);• Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. <p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelestarian Cagar Budaya, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);• Desa pemajuan kebudayaan;• Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital;• Penyelenggaraan event film, musik, dan seni;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan fasilitasi dan kerjasama dalam perlindungan dan pengembangan warisan budaya;• Giat warisan budaya;• Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;• Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional; • Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia; • Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi <i>Startup</i> Digital; • Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Peningkatan dan Pembangunan Prasarana Penunjang Konektivitas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU); • Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga di Kabupaten Gresik.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi dengan <i>output</i> pengembangan pendidikan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi laut dan udara;</p>
	Provinsi Jawa Timur	<p>Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur PLTA; • Pembangunan PLTM.
	Provinsi Jawa Timur	<p>Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</p>
	Provinsi Jawa Timur	<p>Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;</p>
	Provinsi Jawa Timur	<p>Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif, dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat;</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu;
	Provinsi Jawa Timur	<i>Double Track</i> Jawa Selatan;
	Provinsi Jawa Timur	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Banten

Ringkasan Prioritas Nasional



3
Proyek
(highlight)



27
Proyek
(highlight)



11
Proyek
(highlight)



5
Proyek
(highlight)



50
Proyek
(highlight)



7
Proyek
(highlight)



20
Proyek
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan
Bergizi Gratis

15

Jumlah
PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Cilegon Serang
- ❖ Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang
- ❖ Kawasan Pariwisata Unggulan Labuan-Tanjung Lesung
- ❖ Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (bagian dari Kawasan Aglomerasi Jakarta)
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan Air, dan Energi di Banten

33 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Provinsi Banten

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang <ul style="list-style-type: none">• Kota Cilegon• Kab. Serang• Kota Serang	Pengembangan Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya;• Preservasi Jalan Merak-Batas Kota Cilegon;• Pengembangan kawasan terintegrasi Merak-Bakauheni.
A2	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang (termasuk Kawasan Industri Krakatau <i>Industrial Estate</i> Cilegon (KIEC) dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar) <ul style="list-style-type: none">• Kota Cilegon• Kab. Serang• Kab. Tangerang	Penguatan ekosistem Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas;• Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan;• Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi;• Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu;• Penyelesaian hambatan perizinan berusaha dan penanaman modal sektor industri;• Regulasi pengembangan perwilayahan industri.
A3	Kawasan Pariwisata Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan Labuan-Tanjung Lesung, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Penguatan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata KEK Tanjung Lesung;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkasbitung-Panimbang; • Preservasi Jalan Simpang Labuan-Saketi-Serang-Batas Kota Pandeglang-Rangkasbitung.
A4	<p>Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (bagian dari Kawasan Aglomerasi Jakarta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tangerang • Kota Tangerang • Kota Tangerang Selatan 	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Tangerang Raya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya; • Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja; • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong; • Pengembangan ekosistem IPTEKIN/RnD; • Pengembangan Ekosistem Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional; • Peningkatan Ketahanan Banjir Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan; • Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU); • Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; • Pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran; • Pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere; • Pembangunan Jalan Tol Serpong - Balaraja;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Angkutan Umum Masal Perkotaan Jabodetabek <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta <i>East - West Phase I</i>.
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten <ul style="list-style-type: none">• Kab. Serang• Kab. Tangerang• Kab. Lebak• Kab. Pandeglang	Penguatan kemandirian kawasan sebagai langkah menuju swasembada pangan, air, dan energi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Cisadane, D.I. Cibaliung;• Penguatan kelembagaan koperasi;• Mencetak Lahan Pertanian;• Alat dan mesin pertanian;• Pengembangan ternak ruminansia potong;• Peningkatan Infrastruktur Budidaya Udang - IISAP;• Pembangunan Bendungan Karian;• Karian Dam-Serpong <i>Water Conveyance System</i> (SPAM);• Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang dirawat dan dipelihara;• Pembangunan tanggul pantai;• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani. <p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Agromina Wisata, Kabupaten Serang, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman <i>megathrust</i> dan tsunami di Kawasan Perkotaan Cilegon dan Pesisir Barat Banten (<i>Megathrust</i> Selat Sunda).
	Provinsi Banten	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Banten	penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Penguatan Pers dan Media Massa, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan bidang jurnalistik;• Pelatihan SDM bidang penyiaran.
	Provinsi Banten	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Banten	Penguatan upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pelestarian kawasan konservasi TN Ujung Kulon secara terpadu melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi;• Pelestarian kawasan konservasi TN Halimun-Salak secara terpadu melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
	Provinsi Banten	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi, dengan <i>output</i> pengembangan pendidikan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi laut dan udara;
	Provinsi Banten	Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 215 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Banten	<p>pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</p> <p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Penemuan aktif dan skrining <i>mobile</i> penyakit menular;• Pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, HIV);• Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat.
	Provinsi Banten	<p>Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan;• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.
	Provinsi Banten	<p>Pembangunan RS Lengkap Berkualitas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		standar di Pustu, Puskesmas, dan RS Daerah; <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak.
	Provinsi Banten	Fasilitasi/pembinaan terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
	Provinsi Banten	Penyehatan Lingkungan, dengan <i>output</i> penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat);
	Provinsi Banten	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Banten	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan UKS, Kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan layanan KB berkualitas dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup. <p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Banten	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.
	Provinsi Banten	<p>Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> dengan <i>output</i> pemenuhan cakupan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra- <i>stunting</i> , pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);
	Provinsi Banten	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan (Pengarusahaan Gender) PUG dalam proses pembangunan;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Banten	Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 219 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Banten	Penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas energi listrik, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;• Pembangunan PLTM.
	Provinsi Banten	Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian produk;
	Provinsi Banten	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu;
	Provinsi Banten	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi Startup Gim Indonesia;• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi Startup Digital;• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.
	Provinsi Banten	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Bali

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

5

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Wilayah Metropolitan Denpasar (termasuk KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali)
- ❖ Kawasan Perkotaan Singaraja
- ❖ Kawasan Pariwisata Unggulan Bali
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusa Penida
- ❖ Kawasan Afirmasi Nusa Penida
- ❖ Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusa Penida
- ❖ Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan
- ❖ Kawasan Konservasi TN Bali Barat
- ❖ Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur-Bukit Payang
- ❖ Kawasan Konservasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan

36 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Provinsi Bali

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	WM Denpasar (termasuk KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali) <ul style="list-style-type: none">Kota DenpasarKab. BadungKab. GianyarKab. Tabanan	Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan (WM) Denpasar (Sarbagita) yang berkelanjutan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Penyelesaian Prasarana Pengaman Pantai Bali (<i>Bali Beach Conservation Project</i>);Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur;Pengembangan KEK Kura-Kura Bali;Preservasi Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali-Mengwitani-Bts. Kota Denpasar;Pembangunan instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Denpasar berbasis teknologi ramah lingkungan;Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>Bali Maritime Tourism Hub</i>);Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan.
A2	Kawasan Pariwisata Unggulan Bali (sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) <ul style="list-style-type: none">Kota DenpasarKab. JembranaKab. TabananKab. BadungKab. Buleleng	Peningkatan kualitas pariwisata unggulan Bali beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulan;Pelestarian cagar budaya, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);Pembangunan Terminal Pelabuhan Nusa Penida;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 222 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Gianyar • Kab. Bangli • Kab. Klungkung • Kab. Karangasem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Pendidikan Ganesha melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); • Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Udayana melalui pembiayaan SBSN.
A3	Kawasan Perkotaan Singaraja <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Buleleng 	Pembangunan Kawasan Perkotaan (Non-Wilayah Metropolitan) Singaraja, dengan <i>output</i> perbaikan geometrik Bts. Kota Singaraja–Mengwitani (Sc. 9 dan 10).
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Jembrana 	Penguatan sentra produksi dan distribusi produk kelautan dan perikanan di Kab. Jembrana, dengan <i>output</i> pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan.
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusa Penida <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Kab. Karangasem • Kab. Klungkung 	Pemenuhan upaya swasembada pangan, air, dan energi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian cagar budaya, ODCB, dan OPK dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan; • Pengembangan kawasan tanaman pangan; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan ternak ruminansia; • Pengembangan ternak ruminansia potong; • Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian; • Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 223 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani; • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan <i>broodstock center</i> udang di Kab. Karangasem; • Konservasi sumber daya air, dengan <i>output</i> pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial; • Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur; • Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan <i>Battery Energy Storage System</i> (BESS).
D1	Kawasan Afirmasi Nusa Penida (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Klungkung 	Percepatan pemerataan pembangunan di Kawasan Afirmasi Nusa Penida sebagai daerah terdepan, dengan <i>output</i> penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan.
D2 D3	Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema	Pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) dan Kawasan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Santi Nusa Penida (D2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Klungkung <p>Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan (D3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tabanan 	<p>Perdesaan Shiny Tabanan (Kabupaten Tabanan), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
E1	<p>Kawasan Konservasi TN Bali Barat (E1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Jembrana • Kab. Buleleng <p>Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur-Bukit Payang (E2)</p>	<p>Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional (TN) Bali Barat, Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur-Bukit Payang, dan TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan hutan lestari; • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan; • Perlindungan dan pengamanan hutan.
E2		
E3		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none">Kab. Bangli <p>Kawasan Konservasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan (E3)</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. TabananKab. Buleleng <p>Kawasan Rawan Bencana Tsunami dan <i>Megathrust</i> di Bali</p>	<p>Penguatan mitigasi risiko bencana tsunami dan <i>megathrust</i> di Bali, dengan <i>output</i> penerapan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman <i>megathrust</i> dan tsunami di WM Denpasar.</p>
	Provinsi Bali	<p>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">Fasilitasi dan promosi industri gim nasional;Fasilitasi inkubasi dan akselerasi <i>startup</i> gim Indonesia;Pembinaan/pendampingan melalui inkubasi <i>startup</i> digital;Pelatihan talenta digital yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.
	Provinsi Bali	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap di dunia usaha dan dunia industri, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan;Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 226 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;• Revitalisasi pendidikan nonformal;• Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;• Pembangunan unit sekolah baru.
	Provinsi Bali	<p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba;• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan pada Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di Rumah Sakit (RS) Daerah;• Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan;• Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;• Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 227 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Membina Puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;• Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak menular (PTM) terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik.
	Provinsi Bali	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i> penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.
	Provinsi Bali	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)-Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bali	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kesehatan reproduksi (kespro), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Bali	<p>Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemecuan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>
	Provinsi Bali	<p>Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i> pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>antenatal care</i> [ANC], tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</p>
	Provinsi Bali	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bali	<p>Penuntasan Tuberkulosis (TBC atau TB) dan pengendalian penyakit menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (Terapi Pencegahan Tuberkulosis [TPT]);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan <i>skrining mobile</i> penyakit menular;• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, kusta, malaria, HIV, schistosomiasis);• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat.
	Provinsi Bali	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 230 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan. <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Bali	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan hutan secara lestari, melalui peningkatan produktivitas hasil kehutanan, pengembangan produk melalui agroforestri, pengembangan kapasitas pengelola kawasan, penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan hutan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 231 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Bali	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Bali	Percepatan pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bali, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM);• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG);• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU);• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik dan Gardu Induk;• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV <i>Java Bali Interconnection</i>.
	Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi, dengan <i>output</i> pengembangan pendidikan vokasi SDM transportasi melalui diklat transportasi darat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN

4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

3

Jumlah PSN

Lokasi Prioritas



- ❖ Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena
- ❖ Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram
- ❖ Kawasan Industri Sumbawa Barat
- ❖ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
- ❖ Kawasan Sentra Garam
- ❖ Kawasan Perikanan dan Sentra Rumpur Laut
- ❖ Kawasan Potensial Swasembada Pangan
- ❖ Kawasan Potensial Swasembada Air
- ❖ Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun
- ❖ Kawasan Transmigrasi Selaparang
- ❖ KKN Gili Matra
- ❖ KKD Gili Balu
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Mataram

35 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 234 -

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan	Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Pemenang – Bayan; • Preservasi jalan dukungan Kawasan Prioritas - Rempung - Labuhan Lombok; • Preservasi jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili-Tramena - Mataram – Gerung; • <i>Event</i> MICE dalam negeri; • Pendukung <i>event</i> daerah, pelaksanaan kegiatan (<i>events</i>) nasional dan internasional, jejaring Destinasi Pariwisata di wilayah Destinasi II yang dikembangkan; • Dokumen perencanaan daerah pariwisata di wilayah destinasi II yang terpadu; • Desa wisata yang dikembangkan; • Koordinasi strategis perencanaan dan pengembangan Geopark Rinjani; • Penguatan tata kelola kelembagaan kawasan geopark; • Optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan geopark; • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan; • Pengembangan produk melalui agroforestri; • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;
A2	Lombok	
A3	Tramena	
A4	<ul style="list-style-type: none"> • A1: Kota Mataram 	
A5	<ul style="list-style-type: none"> • A2: Kab. Lombok Utara • A3: Kab. Lombok Barat • A4: Kab. Lombok Tengah • A5: Kab. Lombok Timur 	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 235 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kelompok perhutanan sosial;• Perlindungan serta pengamanan hutan;• Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata;• SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja;• Sertifikasi SDM bidang pariwisata;• Publikasi;• Promosi terpadu;• Konten promosi wisata minat khusus;• Jejaring promosi wisata minat khusus;• Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal;• Koordinasi implementasi <i>Blue, Green, Circular Economy</i> pada usaha pariwisata;• Penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata.
A6	Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram <ul style="list-style-type: none">• A6: Kota Mataram	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Mataram, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL) Kota Mataram;• Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Mataram melalui pembiayaan SBSN.
A7	Kawasan Industri Sumbawa Barat <ul style="list-style-type: none">• A7: Kab. Sumbawa Barat	Pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi KI Sumbawa Barat; • Preservasi jalan ruas PAL IV (KM 4.00) - KM 70.00; • Sarana prasarana kesehatan/air bersih/listrik; • Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha serta rantai pasok; • Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM; • Peningkatan investasi hilirisasi tembaga; • Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat.
A8	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika: <ul style="list-style-type: none"> • A8: Kab. Lombok Tengah 	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); • Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK; • Peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK; • Pelayanan investasi administrator KEK tipe A.
B1	Kawasan Sentra Garam	Pengembangan kawasan sentra garam, dengan <i>output</i> :
B2		
B3	<ul style="list-style-type: none"> • B1: Kab. Bima • B2: Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri;
B4	<ul style="list-style-type: none"> • Lombok Timur • B3: Kab. Sumbawa • B4: Kab. Lombok Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pendampingan pelaku usaha komoditas yang siap edar; • Peningkatan kualitas garam yang memenuhi standar garam industri; • Pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 237 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik.
B5 B6 B7 B8 B9	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut <ul style="list-style-type: none"> • B5: Kab. Sumbawa • B6: Kab. Lombok Timur • B7: Kab. Bima • B8: Kab. Lombok Tengah • B9: Kab. Lombok Barat 	Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut; • Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia; • Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut – ‘<i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>’; • Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut; • Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian; • Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak).
C1 C2 C3 C4	Kawasan Potensial Swasembada Pangan <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Sumbawa • C2: Kab. Lombok Timur • C3: Kab. Dompu • C4: Kab. Bima 	Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan swasembada pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Penyediaan Alat dan mesin pertanian; • Pengembangan dan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan komoditas hortikultura; • Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Stabilitasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
C5	Kawasan Potensial Swasembada Air <ul style="list-style-type: none">• C5: Lombok Barat	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, dengan <i>output</i> pembangunan Bendungan Meninting.
D1	Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun <ul style="list-style-type: none">• D1: Kabupaten Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas berbasis Pariwisata Sembalun Kabupaten Lombok Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, dan sanitasi);• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
D2	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> • D2: KT Selarapang Kabupaten Lombok Timur 	Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Selarapang di Kab. Lombok Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.
E1 E2	Kawasan Konservasi <ul style="list-style-type: none"> • E1: Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara • E2: Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat 	Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP3K), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana pengelolaan kawasan dan monitoring ekosistem; • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan kawasan; • Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan; • <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKN Gili Matra.
E3	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi <ul style="list-style-type: none"> • E3: Kota Mataram 	Pengelolaan risiko bencana Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur (BMKG); • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik (PUPR).
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan kawasan pariwisata, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan koridor logistik Trans Lombok pada Bayan Sembalun dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 240 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Pemenang Bayan serta Jalan Trans Sumbawa Simpang Negara - Sumbawa Besar dan perlengkapan jalan;</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Fasilitator/Enabler</i> Digital PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring;• Bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital;• Transmisi yang terbangun;• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Peningkatan pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan dan pesisir, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);• Rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut;• Kawasan konservasi perairan yang operasional (kumulatif);• <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA;• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati;• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;• Penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon;• Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 241 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan prasarana pengaman pantai;• Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Pengelolaan risiko bencana banjir dan bencana alam lainnya di daerah berisiko tinggi serta pengelolaan tampungan air serbaguna, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan pengendalian banjir Kota Bima;• <i>Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities.</i>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses dan bidang pendidikan serta penguatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Layanan kerja sama nasional dan internasional;• Sertifikasi profesi;• Pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi di sektor strategis;• Kemitraan antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;• Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 242 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none">• Satuan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;• Pengembangan kerja sama pelatihan;• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan;• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);• Pembangunan unit sekolah baru. <p>Peningkatan kontribusi Iptek dan Inovasi (Iptekin) dalam Pembangunan Nasional, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas SDM Iptekin;• Penguatan infrastruktur Iptekin strategis;• Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerja sama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin;• Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);• Penguatan kapasitas <i>Science Techno Park</i> (STP);• <i>Pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di daerah;• <i>Pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas;• <i>Pilot project hub</i> prioritas tematik Iptekin di BRIN;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 243 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas. <p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i>;• Tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya;• Pendampingan kesehatan ibu hamil dan balita bermasalah gizi;• Pelatihan pencegahan <i>stunting</i>;• Penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi (<i>weight faltering, underweight, gizi kurang</i>);• Keluarga yang mendapat bantuan sosial;• Obat dan perbekalan kesehatan;• Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit;• Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian;• Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 244 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksananya;• Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria, dan kusta) bagi masyarakat;• Penanggulangan TB di tempat kerja;• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria, dan kusta);• Pelaporan kasus (TBC, HIV/AIDS, malaria, dan kusta) penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria, dan kusta);• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan output :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 245 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan, serta PONEK-PONED;• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi. <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> :</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan KIE;• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;• Penerapan dan penegakan KTR;• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 246 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak;• Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak;• Penetapan fasyankes pelaksana pelayanan <i>telemedicine</i>;• Penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN);• Peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA;• Fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA;• Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampunan untuk pelayanan KJSU-KIA;• Fasilitasi dan pembinaan lembaga;• Alat kesehatan layanan kanker terpadu;• Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis;• Penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;• Pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama;• Sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspecialis;• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;• Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kabupaten/kota yang hanya memiliki RS tipe D;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 247 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan kualitas mutu pelayanan;• Pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri;• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan;• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 248 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyebrangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kilo;• Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional;• Layanan angkutan tol laut prioritas nasional;• Layanan angkutan ternak prioritas nasional;• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga pada Kab. Bima, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Lombok Utara.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman serta peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tenaga terlatih pengawasan kualitas air minum;• Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman;• Optimalisasi SPAM Semongkat Kab. Sumbawa.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 249 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;• Penanganan pemukiman kumuh terpadu. <p>Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitoring tingkat komponen dalam negeri bidang aneka energi baru dan terbarukan;• Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik;• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;• Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;• Perluasan layanan penyiaran digital;• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, penyaluran



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 250 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal;• Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan keterampilan digital;• Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;• Akreditasi lembaga halal;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kemitraan penjamin produk halal. <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i> pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.</p>
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah melalui penilaian HAM;• Pendidikan HAM bagi K/L/D;• Pelaksanaan ToT Diklat Perancang PUU yang berperspektif HAM;• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;• Pengembangan kewirausahaan.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk bagi usaha kecil;• Pendidikan SKKNI bagi usaha kecil untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam pengembangan produk;• Fasilitasi bagi usaha kecil yang mendukung Makan Bergizi Gratis.
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;• Verifikasi terhadap perusahaan pers;• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;• Pelatihan bidang jurnalistik;• Pelatihan SDM bidang penyiaran.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ringkasan Prioritas Nasional



16
Proyek
(highlight)



68
Proyek
(highlight)



67
Proyek
(highlight)



115
Proyek
(highlight)



22
Proyek
(highlight)



62
Proyek
(highlight)



15
Proyek
(highlight)



23
Proyek
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan
Bergizi Gratis

6

Jumlah
PSN



Lokasi Prioritas

21

- ❖ Kawasan Pariwisata DPP Labuan Bajo dan perluasannya menjadi DPP Labuan Bajo – Flores – Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Ende
- ❖ Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo – Kab. Manggarai Barat
- ❖ Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut – Kab. Kupang dan Kota Kupang, Kab. Sumba Timur
- ❖ Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut – Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Alor
- ❖ Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam – Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Nagekeo
- ❖ Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam – Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Timur, Kab. Ende
- ❖ Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur – Kab. Sumba Tengah
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan – Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sikka, Kab. Timor Tengah Selatan.
- ❖ Kawasan Swasembada Air – Kab. Kupang, Kab. Nagekeo, Kab. Sikka, Kab. Timor Tengah Selatan
- ❖ Kawasan Swasembada Energi – Kab. Manggarai, Kab. Kupang
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sabu Raijua
- ❖ Kawasan Perbatasan (PKSN dan Wilayah Pendukung) – Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Alor
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sabu Raijua, Kab. Malaka
- ❖ Kawasan Transmigrasi – Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Malaka, Kab. Belu
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas (Kawasan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa) – Kab. Ngada
- ❖ Kawasan Konservasi TN Komodo – Kab. Manggarai Barat
- ❖ Kawasan Konservasi Cagar Alam Wae Wuul – Kab. Manggarai Barat
- ❖ Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya – Kab. Alor
- ❖ Kawasan Konservasi TWAL Tujuh Belas Pulau – Kab. Ngada
- ❖ Kawasan Konservasi Cagar Alam Riung – Kab. Ngada
- ❖ Kawasan Konservasi Nasional TNP Laut Sawu dan Sekitarnya – Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, dan Kab. Manggarai Barat

35 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM)
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	<p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">A1: Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo–Flores (Kab. Manggarai*, Kab. Ngada*, Kab. Ende*) <p>Keterangan: *) Indikasi <i>key tourism area (KTA)</i> perluasan</p>	<p>Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting berkelanjutan (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">Dukungan pelaksanaan <i>event</i> daerah, nasional, dan internasional;Pembangunan infrastruktur kelistrikan;Revitalisasi pasar rakyat;Pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata;Manajemen kunjungan pariwisata;Promosi investasi;Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa;Peningkatan akses pembiayaan modal;Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa;Perlindungan jalur jelajah satwa komodo;Pengadaan ambulans laut;Promosi pariwisata di Kawasan Labuan Bajo Flores.
A2	<p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">A2: Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat)	<p>Pengembangan kawasan perkotaan pariwisata Labuan Bajo, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan infrastruktur kelistrikan;Pembangunan infrastruktur TIK;Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;Perluasan layanan penyiaran digital;Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 256 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
B1 B2 B3 B4 B5	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Rumput Laut) Sentra Industri <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kab. Kupang dan Kota Kupang • B2: Kab. Sumba Timur Sentra Produksi: <ul style="list-style-type: none"> • B3: Kab. Rote Ndao • B4: Kab. Sabu Raijua • B5: Kab. Alor 	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan; • Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat; • Peningkatan sarana prasarana pendukung; • Pengembangan riset dan inovasi teknologi; • Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan industri; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM kelautan dan perikanan; • Pengembangan industri rumput laut; • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi; • Peningkatan ekspor produk rumput laut.
B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Garam) Sentra Industri <ul style="list-style-type: none"> • B6: Kab. Sabu Raijua • B7: Kab. Kupang • B8: Kab. Nagekeo Sentra Produksi	Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Pendampingan industri pengolahan garam industri dan garam konsumsi; • Peningkatan kapasitas petambak garam; • Peningkatan sarana prasarana pendukung;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 257 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • B9: Kab. Sabu Raijua • B10: Kab. Kupang • B11: Kab. Nagekeo • B12: Kab. Sumba Timur • B13: Kab. Ende 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan riset dan inovasi teknologi; • Korporasi petambak garam; • Peningkatan produksi garam konsumsi dan garam industri; • Pengembangan industri garam konsumsi dan garam industri; • Pengembangan tata niaga/pemasaran garam konsumsi dan garam industri; • Penyediaan akses terhadap pembiayaan.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Akreditasi lembaga halal; • Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan daerah 3TP (Jalan Nualain – Laktutus); • <i>Replacement</i> fasilitas Pelabuhan Marapokot; • Penyediaan jaringan pelayaran; • Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Kota Kupang (perikanan)• Kab. Sumba Timur (perikanan)	<ul style="list-style-type: none">• Layanan angkutan tol laut prioritas nasional;• Layanan angkutan ternak prioritas nasional;• Layanan angkutan rede prioritas nasional;• Pengembangan dan optimalisasi Bandara El Tari;• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi;• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan konektivitas perkotaan;• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;• Perluasan layanan penyiaran digital;• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten dan infrastruktur pencarian dan pertolongan;• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T;• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kab. Manggarai, Kab. Sikka, Kab. Rote Ndao, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Ende, Kab. Sumba Timur, Kab. Alor, dan Kab. Sabu Raijua. <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan Politeknik) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
C1	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Manggarai Barat (Pariwisata) <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Sumba Tengah 	<p>Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengembangan infrastruktur; • Penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian; • Penyediaan alat dan mesin pertanian; • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
C2 C3 C4 C5 C8	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C2: Kab. Manggarai Barat* • C3: Kab. Manggarai* • C4: Kab. Manggarai Timur* • C5: Kab. Sikka* • C8: Kab. Timor Tengah Selatan* <p>Kawasan Rentan Pangan:</p>	<p>Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian, pangan akuatik/<i>blue food</i> berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (ternak ruminansia dan babi), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan olahan hasil komoditas pangan dan produk turunannya; • Penyediaan alat dan mesin pertanian; • Fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM kelautan dan perikanan; • Penguatan daya tawar nelayan dan meningkatkan akses pasar; • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Pengembangan ternak babi dan ternak ruminansia potong;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Alor** <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan; • Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah; • Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan; • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani. <p>Penguatan kawasan rentan pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • Penyediaan alat dan mesin pertanian; • Mencetak lahan pertanian; • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; • Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah.
C3 C6	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C3: Kab. Manggarai* • C6: Kab. Kupang* 	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan optimalisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 261 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** • Kab. Timor Tengah Selatan** <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan optimalisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM); • Pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik; • Pembangunan infrastruktur gardu induk; • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan dengan <i>output</i> pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T.</p>
C5 C6 C7 C8	<p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C5: Kab. Sikka* • C6: Kab. Kupang* • C7: Kab. Nagekeo* • C8: Kab. Timor Tengah Selatan* <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi</p>	<p>Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bendungan Mbay; • Pembangunan Bendungan Manikin; • Pembangunan Bendungan Napun Gete; • Pembangunan Bendungan Temef; • Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan mata air dan pengawetan sumber daya air.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 262 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D1 D2 D3	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: <ul style="list-style-type: none"> • D1: Kab. Sumba Tengah (pariwisata, padi, dan jagung) • D2: Kab. Sumba Barat Daya (pariwisata dan jambu mete) • D3: Kab. Sabu Raijua (kambing) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; • Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; • Pengembangan desa wisata; • Pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; • Perluasan layanan penyiaran digital; • Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, serta layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi; • Pengembangan komoditas perkebunan unggulan; • Pengembangan ternak babi dan ternak ruminansia potong.
D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Perbatasan PKS N dan Wilayah Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • D4: PKS Kefamenanu, serta Kec. Biboki Monleu, Naibenu, Mutis, dan Musi (Kab. Timor Tengah Utara) 	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T; • Penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi; • Operasional dan pemeliharaan akses internet;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none">• D5: PKSN Atambua, serta Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, dan Nanaet Duabesi (Kab. Belu)• D6: PKSN Kalabahi, serta Kec. Pantai Timur (Kab. Alor) <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none">• D7: Kec. Lamboya dan Lamboya Barat (Kab. Sumba Barat)• D8: Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu (Kab. Sumba Timur)• D9: Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur (Kab. Kupang)• D10: Kec. Nunkolo, Kot Olin, Kualin	<ul style="list-style-type: none">• Layanan konektivitas angkutan keperintisan;• Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan sarana prasarana penunjang di Kawasan Perbatasan Oepoli di Kabupaten Kupang;• Peningkatan pos pintu masuk negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 264 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D15 D16 D17	(Kab. Timor Tengah Selatan)	
	<ul style="list-style-type: none"> • D11: Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat, Ndao Nuse (Kab. Rote Ndao) • D12: Kec. Kodi Balaghar (Kab. Sumba Barat Daya) • D13: Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Rajua (Kab. Sabu Rajua) • D14: Kec. Kobalima Timur (Kab. Malaka) 	
	Kawasan Afirmasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu di Kab. Timor Tengah Utara, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.
	Kawasan Transmigrasi (KT):	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur di Kab. Malaka, dengan <i>output</i> :
	<ul style="list-style-type: none"> • D15: KT. Ponu (Kab. Timor Tengah Utara) • D16: KT. Kobalima Timur (Kab. Malaka) • D17: KT. Tasifeto-Mandeu (Kab. Belu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi; • Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 265 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tasifeto-Mandeu di Kab. Belu, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.
D18	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none">• D18: Kawasan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa (Kab. Ngada)	Pengembangan Kawasan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa Kabupaten Ngada, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 266 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Belu (PKSN Atambua dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Malaka (Kecamatan 	<p>Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan dasar dan menengah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; • Peningkatan keterjangkauan ke satuan pendidikan; • Model kurikulum yang adaptif dan kontekstual; • Pembinaan afirmasi dan pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; • Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran; • Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK); • Pembinaan program literasi pada generasi muda; • Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; • Peningkatan literasi digital; • Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP); • Pembangunan unit sekolah baru.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 267 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur	
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;• Pembinaan lembaga kebudayaan;• Fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;• Perlindungan warisan budaya;• Pengembangan <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan;• Produksi konten media kebudayaan;• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;• Pengembangan <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.
	• Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan	Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan;• Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 268 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Kupang (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur • Kab. Alor (PKSN Kalabahi dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; • Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan; • Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan; • Pembinaan dan pendampingan layanan kesehatan bergerak; • Implementasi layanan <i>telemedicine</i>; • Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD; • Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah; • Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan; • Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan; • Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 269 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Peningkatan layanan Rumah Sakit (RS) Lengkap Berkualitas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan;• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 270 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Penanganan penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Malaka • Kab. Sumba Barat • Kab. Sumba Timur • Kab. Sabu Raijua 	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, kusta, rabies) bagi masyarakat; • Penanggulangan TB di tempat kerja;
	Penanganan penyakit Malaria: 12 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB; • Penemuan aktif dan <i>Skринing mobile</i> penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, kusta, rabies);
	Penanganan penyakit ISPA: <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Belu • Kab. Lembata • Kab. Sikka • Kab. Flores Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kasus (TBC, malaria, ISPA, kusta, rabies) penyakit menular oleh fasyankes swasta; • Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, kusta, rabies);
	Penanganan penyakit Rabies: <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Timor Tengah Selatan • Kab. Sikka • Kab. Ende 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan obat hewan; • Operasional vaksinasi hewan.
	Penanganan penyakit Kusta: Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 271 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan KIE;• Pelaksanaan skrining penyakit dan risiko penyakit;• Peningkatan kapasitas konseling UBM;• Penerapan & penegakan KTR;• Layanan produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan;• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran untuk mencegah kasus baru;• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;• Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i>;• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;• Peningkatan kapasitas laboratorium;• Pemenuhan sediaan farmasi;• Pengendalian resistensi antimikroba;• Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi, siber dan <i>farmakovigilans</i>;• Penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 272 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan dan pendayagunaan kapasitas SDM kesehatan.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita; • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan; • Peningkatan kualitas PONEK-PONED; • Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia; • Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri; • Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p> <p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); • Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); • Optimalisasi dana desa untuk perumahan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 273 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Pemberantasan IUU <i>Fishing</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> WPP 573 (perbatasan perairan dengan Timor Leste dan Australia) 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan pemukiman kumuh terpadu. <p>Penguatan pertahanan keamanan dengan mewujudkan kedaulatan di laut terutama dalam pemberantasan IUU <i>Fishing</i> pada perbatasan perairan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (<i>transboundary management</i>), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional; Pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar; Pemberantasan IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) <i>fishing</i>.
E1	Kawasan	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> :
E2	Konservasi:	
E3	• E1: TN Komodo	• Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;
E4	(Kab. Manggarai Barat)	• Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;
E5	• E2: CA Wae Wuul (Kab. Manggarai Barat)	• Kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);
E6	• E3: KKD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya (Kab. Alor)	• Penanganan kasus tindak pidana LHK P21;
	• E4: TWAL Tujuh Belas Pulau (Kab. Ngada)	• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;
	• E5: CA Riung (Kab. Ngada)	• Penguatan perencanaan kawasan konservasi;
	• E6: KKN TNP Laut Sawu dan Sekitarnya (10	• Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 274 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Kab. di Prov. NTT)	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;• Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKD Selat Pantar (Kab. Alor) dan KKN Laut Sawu.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;• Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;• Penerapan <i>nature-based solutions</i>;• Penguatan kelompok perhutanan sosial;• Rehabilitasi hutan dan lahan;• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 275 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah melalui penilaian HAM;• Pendidikan HAM bagi K/L/D;• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 276 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.</p> <p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;• Verifikasi terhadap perusahaan pers;• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;• Penyusunan rekomendasi hasil pemerinkatan Indeks Penyiaran Indonesia;• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;• Pelatihan bidang jurnalistik;• Pelatihan SDM bidang penyiaran.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Kalimantan Barat

Ringkasan Prioritas Nasional

 **32**
PN2 *Proyek*
(highlight)

 **5**
PN3 *Proyek*
(highlight)

 **43**
PN4 *Proyek*
(highlight)

 **22**
PN5 *Proyek*
(highlight)

 **34**
PN6 *Proyek*
(highlight)

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

7

Jumlah PSN



Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Mempawah
- ❖ Kawasan Industri Ketapang
- ❖ Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing
- ❖ Kawasan Sentra Kelapa Sawit
- ❖ Kawasan Transmigrasi
- ❖ Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*)
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Rasau Jaya
- ❖ Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas

23 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan Pariwisata Sambas Singkawang: <ul style="list-style-type: none">• A1: Kabupaten Sambas• A2: Kota Singkawang• A3: Kabupaten Bengkayang	Pengembangan Kawasan Pariwisata Sambas – Singkawang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan IPA Kap. 50 L/dt SPAM IKK Pemangkat Kabupaten Sambas;• Pembangunan IPA Kap. 20 L/dt dan Jaringan Perpipaan IKK Sejangkung Kabupaten Sambas;• Pembangunan IPA Kap. 20 L/dt dan Jaringan Perpipaan SPAM Seluang Kota Singkawang.
A4	Kawasan Perkotaan Kecil: <ul style="list-style-type: none">• A4: Kabupaten Mempawah (Kijing)	Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, dengan <i>output</i> Pembangunan SPAM - Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bangunan Pendukung SPAM Pelabuhan Kijing Kab. Mempawah.
A5	Kawasan Industri Ketapang: <ul style="list-style-type: none">• A5: Kabupaten Ketapang	Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penanganan jalan koridor logistik Nanga Tayap – Sungai Kelik;• Industri <i>smelter</i>/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya;• Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan bauksit;• Penetapan standar dalam rangka mendukung ekspor;• Penetapan standar dalam rangka mendukung ekspor dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri <i>smelter</i> logam bukan besi dan turunannya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 279 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dan lulusan program DII, DIII, dan DIV reguler; • Peningkatan produktivitas sektor hulu; • Fasilitasi investasi industri kelapa sawit dan pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan; • Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kendawangan Kab. Ketapang; • Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri; • Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri; • Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri RPJMN; • Pengembangan Kawasan Industri Ketapang; • Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit di Ketapang, Kalimantan Barat.
A6	Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing:	Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing, dengan <i>output</i> :
A7		
A8		
A9		
	<ul style="list-style-type: none"> • A6: Kabupaten Mempawah • A7: Kabupaten Landak • A8: Kota Pontianak • A9: Kota Singkawang 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan koridor logistik BTS. Kota Pontianak – Sp. Ampar/Tayan; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL) Kota Pontianak; • Pembangunan SPAM - Pembangunan IPA Kap. 2 x 50 Liter/detik SPAM IKK Sungai Kunyit (Mendukung Pelabuhan Kijing) Kab. Mempawah; • Pembangunan IPA Kap. 10 L/dt dan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Senakin Kabupaten Landak;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A10	Kawasan Industri Hilirisasi Mineral • A10: Kabupaten Sanggau	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Kawasan Industri Landak untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Kijing; • Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina Terpadu di Mempawah, Kalimantan Barat.
		<p>Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral sesuai dengan potensi daerah, dengan <i>output</i> pengembangan Kawasan Industri Toba Alumina dan Kawasan Industri Pulau Penebang.</p>
B1 B2	Kawasan Sentra Perkebunan • B1: Kabupaten Ketapang • B2: Kabupaten Sanggau	<p>Penetapan Kriteria standar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kriteria standar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit; • Fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Indonesia <i>Sustainable Palm Oil</i> (LS ISPO) hilir dan penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit; • Pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (<i>Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel</i>) berbahan baku <i>technical oil</i>; • <i>Pilot Plant Fraksionasi Multipurpose</i> Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap,	<p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kabupaten Kubu Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
D2	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP): <ul style="list-style-type: none"> • D2: PKSN Paloh Aruk, Kabupaten Sambas • D3: PKSN Jagoi Babang dan Kecamatan Perbatasan 	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Entikong, PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; • Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi; • Pembangunan Jalan dan Jembatan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Nanga Era – BTS. Kaltim;
D3		
D4		
D5		
D6		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 282 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Prioritas Siding – Kabupaten Bengkayang</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="375 841 695 997">• D4: PKSN Entikong, Kabupaten Sanggau<li data-bbox="375 1010 695 1388">• D5: PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas Puring Kencana – Kabupaten Kapuas Hulu<li data-bbox="375 1401 695 1708">• D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas Sintang – Kabupaten , Kabupaten Sintang	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="695 670 1421 796">• Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan;<li data-bbox="695 808 1421 952">• Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan Sei Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 283 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D7	Kawasan Transmigrasi (KT)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ketungau Hulu di Kab. Sintang, dengan <i>output</i> :
D8		
D9		
D10		
	<ul style="list-style-type: none"> • D7: KT Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang • D8: KT Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya • D9: KT Gerbang Mas Perkasa, Kabupaten Sambas • D10: KT Sekayam-Entikong, Kabupaten Sanggau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di Kawasan Transmigrasi; • Pengembangan jalan di Kawasan Transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.
		<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kab. Kubu Raya, melalui pengembangan sarana permukiman di Kawasan Transmigrasi</p> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa di Kab. Sambas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di Kawasan Transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi. <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam - Entikong di Kab. Sanggau, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di Kawasan Transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.
E1	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk kawasan konservasi disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, dengan <i>output</i> :
E2		
E3		
	<ul style="list-style-type: none"> • E1: Kabupaten Kapuas Hulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 284 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • E2: Kabupaten Sintang • E3: Kabupaten Melawi 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat; • Penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon; • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).
	Provinsi Kalimantan Barat	Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral sesuai dengan potensi daerah, dengan <i>output</i> pengembangan Kawasan Industri Toba Alumina dan Kawasan Industri Pulau Penebang.
	Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dengan <i>output</i> Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui FLPP, optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Penguatan pelatihan vokasi serta kualitas pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan mendorong perekonomian lokal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana IAIN Pontianak melalui pembiayaan SBSN; • Pelatihan vokasi di sektor strategis; • Bantuan siswa penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan bantuan sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 285 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan kesehatan ibu dan anak;• Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal di rumah sakit sesuai standar;• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;• Pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar;• Peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar;• Pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar;• Revitalisasi Posyandu dan pemberdayaan masyarakat di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan;• Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;• BMHP untuk Skrining Kesehatan.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 286 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan air minum sanitasi;• Peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);• Layanan imunisasi dasar lengkap;• Skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);• Skrining;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 287 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);• Penerapan & penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);• Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM), dan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Kalimantan Barat	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemucuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Kalimantan Barat	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS;• Kesehatan kerja;• Layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Kalimantan Barat	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Kalimantan Barat	Perlindungan anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 288 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Hilirisasi Kelapa, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perbaikan neraca komoditas kelapa dan produk turunannya;• Pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro;• Peningkatan peluang investasi di sektor industri;• Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor hulu-hilir industri minuman serta hasil tembakau dan bahan penyegar;• Pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi di industri minuman serta hasil tembakau dan bahan penyegar.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan PLTGU Kalbar-1;• Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Swasembada air dengan <i>output</i> Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi serta penguatan ekonomi syariah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;• Pengembangan kewirausahaan;• Pengembangan industri dan UMKM halal;• Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional;• Penguatan ekosistem halal;• Penguatan keuangan syariah;• Penguatan dana sosial syariah.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• pendidikan SKKNI untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam pengembangan produk;• fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;• fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.
	Provinsi Kalimantan Barat	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik; <ul style="list-style-type: none">• Penguatan tata kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan.
	Provinsi Kalimantan Barat	Pencegahan dan penanganan korban perkawinan anak melalui penguatan data, koordinasi lintas sektor serta pengawasan pelaksanaan kebijakan dengan output pemberian bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak.
	Provinsi Kalimantan Barat	Peningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di RS Daerah serta Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah.
	Provinsi Kalimantan Barat	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Kalimantan Barat	Pemenuhan Upaya Swasembada Pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi (kecuali Papua Pegunungan dan Papua Tengah);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 291 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
	Provinsi Kalimantan Barat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten/Kota: Melawi, Kapuas Hulu, Landak, Sanggau, Bengkayang, Kubu Raya, Sekadau, dan Sintang.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Kalimantan Tengah

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

4

Jumlah PSN



Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Industri Hilirisasi Mineral
- ❖ Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah
- ❖ Kawasan Transmigrasi
- ❖ Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah
- ❖ Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan

28 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A3 A4 A5	Kawasan Industri Hilirisasi Mineral <ul style="list-style-type: none"> • A3: Kabupaten Kotawaringin Barat • A4: Kabupaten Sukamara • A5: Kabupaten Barito Timur 	Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit, tembaga dan batubara sesuai dengan potensi daerah, melalui pengembangan Kawasan Industri Kumai Multi Energi (Kabupaten Kotawaringin Barat), Kawasan Industri Sungai Tabuk (Kabupaten Sukamara), dan Kawasan Industri Rimau (Kabupaten Barito Timur).
C1 C2	Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah: <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kabupaten Pulang Pisau • C2: Kabupaten Kapuas • C3: Kabupaten Gunung Mas • C4: Kabupaten Murung Raya • C5: Kabupaten Sukamara 	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/<i>Food Estate</i> Kalimantan Tengah Pulang Pisau - Bts. Kota Kuala Kapuas; • Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/<i>Food Estate</i> Kalimantan Tengah Jabiren - Pulang Pisau; • Optimaliasi geospasial melalui pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2025; • Penguatan <i>On Farm</i> melalui dukungan sarana produksi pertanian serta peningkatan produktivitas lahan pertanian; • Penguatan <i>Off Farm</i> melalui peningkatan akses internet dan kapasitas petani.
D1 D2	Kawasan Transmigrasi (KT)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kab. Sukamara, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 294 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D3	<ul style="list-style-type: none"> • D1: KT Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi; • Pembinaan lembaga ekonomi di kawasan transmigrasi;
	<ul style="list-style-type: none"> • D2: KT Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi; • Bantuan catu pangan di kawasan transmigrasi;
	<ul style="list-style-type: none"> • D3: KT Arut Selatan dan Kota Waringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi. <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kab. Kapuas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan catu pangan di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi. <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kab. Kotawaringin Barat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 295 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
E1 E2	Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah: <ul style="list-style-type: none"> • E1: Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat • E2: Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya 	Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati; • Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); • Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).
E3 E4 E5 E6	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan <ul style="list-style-type: none"> • E3: Kabupaten Katingan • E4: Kabupaten Gunung Mas • E5: Kabupaten Murung Raya • E6: Kabupaten Barito Utara 	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk kawasan konservasi di Wilayah Kalimantan Tengah disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, dengan <i>ouput</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini pengurangan hidrometeorologi ekstrem; • Pemulihan dan restorasi lahan gambut; • Pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG); • Peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut; • Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 296 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>(IP4T) pada kawasan hutan yang berpotensi dilepaskan sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk redistribusi tanah;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi;• Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;• Penguatan kelompok perhutanan sosial;• Pengamanan kawasan hutan.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Pemenuhan Upaya Swasembada Pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;• Pengembangan ternak ruminansia potong.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preservasi jalan Pulang Pisau-BTS Kota Kuala Kapuas;• Preservasi jalan dan jembatan ruas Benangin-BTS Kaltim;• Preservasi jalan Tumbang Samba;• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu;• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik;• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;• Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat;• Layanan penyiaran digital;• Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);• Digitalisasi masyarakat.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Pengembangan kawasan permukiman secara berkelanjutan dan inklusif, melalui Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 298 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jejang pendidikan;• Pembangunan unit sekolah baru;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);• Peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;• SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (<i>teaching factory</i>);• Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dan penguatan digitalisasi desa melalui pelatihan aparatur digital;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Palangka Raya melalui pembiayaan SBSN;• Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya melalui pembiayaan SBSN.
	Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 299 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i>: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p> <p>Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi (KJSU), dan kesehatan ibu anak;• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS;• Pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar;• Peningkatan keterampilan kader kesehatan;• Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu;• Peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi;• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;• Menyediakan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 300 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;• Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan peningkatan kapaistas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan pembinaan: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>stunting</i> (GENTING), implementasi 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);• Penganekaragaman pangan;• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 301 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran. <p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) – Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);• Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir;• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Pengendalian penyakit menular (TBC, malaria dan HIV/AIDS), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 302 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria;• Pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria;• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling upaya berhenti merokok (UBM);• Penerapan & penegakan kawasan tanpa rokok (KTR);• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM;
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, antara lain, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;• Pengembangan kewirausahaan;• Pengembangan industri dan UMKM halal;• Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan ekosistem halal;• Penguatan dana sosial Syariah.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk bagi usaha kecil;• Fasilitasi bagi usaha kecil yang mendukung makan bergizi gratis.
	Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;• Penguatan tata kelola dan pelebagaan PUG dalam proses pembangunan;• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kalimantan Tengah	melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Kalimantan Tengah	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan/atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

Seputar *Highlight* Intervensi

Provinsi Kalimantan Selatan

Ringkasan Prioritas Nasional



*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

2

Jumlah PSN



Lokasi Prioritas

- ❖ Wilayah Metropolitan Banjarmasin
- ❖ Kawasan Pertumbuhan Industri Baru
- ❖ Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Agropolitan Kusan Tengah, Tanah Bumbu
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Agrowisata Hortikultura, Tabalong
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Agrominapolitan, Banjar
- ❖ Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru
- ❖ Kawasan Pegunungan Meratus

33 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Infrastruktur dan Wilayah
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 306 -

Provinsi Kalimantan Selatan

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Wilayah	Perencanaan kawasan dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan <i>output</i> :
A2	Metropolitan	
A3	Banjarmasin	
A4	• A1: Kota Banjarmasin	
A5	• A2: Kota Banjarbaru • A3: Kabupaten Banjar • A4: Kabupaten Barito Kuala • A5: Kabupaten Tanah Laut	
A6	Kawasan	Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, dengan <i>output</i> :
A7	Pertumbuhan	
A8	Industri Baru	
	• A6: Kabupaten Tanah Laut • A7: Kabupaten Tanah Bumbu • A8: Kabupaten Kotabaru	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 307 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri; • Kriteria standar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit; • Peralatan laboratorium/<i>workshop</i>/ layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim; • Pembentukan Lembaga Sertifikasi Indonesia <i>Sustainable Palm Oil</i> (LS ISPO) Hilir; • Penguatan standardisasi untuk hilirisasi sawit; • Fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>); • Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri.
C1	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu	Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, dengan <i>output</i> :
C2		
C3	• C1: Kabupaten Barito Kuala	• Penguatan perbenihan;
C4		
C5	• C2: Kabupaten Banjar	• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;
C6		
C7	• C3: Kabupaten Tapin	• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;
	• C4: Kabupaten Hulu Sungai Selatan	• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;
	• C5: Kabupaten Hulu Sungai Tengah	• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;
		• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 308 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • C6: Kabupaten Hulu Sungai Utara • C7: Kabupaten Tabalong 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan; • Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.
D1	Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; • Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; • Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; • Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan; • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.
D2	Prioritas (KPP)	
D3	<ul style="list-style-type: none"> • D1: Kawasan Agropolitan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu • D2: Kawasan Perdesaan Agrowisata, Hortikultura, Kabupaten Tabalong • D3: Kawasan Perdesaan Agrominapolitan, Kabupaten Banjar 	
D4	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> • D4: KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala 	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kab. Barito Kuala, melalui pengembangan jalan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	
E1	Kawasan	Pengembangan ekowisata kelas dunia di <i>Geopark Geosite</i> Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, dengan <i>output</i> :	
E2	Pegunungan		
E3	Meratus (<i>Geopark</i>		
E4	Meratus dan Kawasan Loksado)		
E5	<ul style="list-style-type: none"> • E1: Kabupaten Hulu Sungai Utara • E2: Kabupaten Hulu Sungai Tengah • E3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan • E4: Kabupaten Tabalong • E5: Kabupaten Tanah Laut • E6: Kabupaten Banjar • E7: Kabupaten Kotabaru • E8: Kabupaten Tapin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK; • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat; • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); • Program desa mandiri peduli gambut; • Program gambut lestari; • Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan; • Pendampingan kelompok perhutanan sosial. 	
E6			
E7			
E8			
		Provinsi Kalimantan Selatan	Pengembangan pengairan dan irigasi serta konservasi sumber daya air, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Tapin; • Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar (lanjutan penyelesaian); • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 310 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Data dan informasi kualitas air di sungai dan danau;• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota di Kabupaten Barito Kuala.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preservasi pemeliharaan rutin jalan ruas Walangsi-Kaparkias;• Persiapan pengembangan Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, melalui fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.</p>
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Swasembada energi serta penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga Provinsi Kalimantan Selatan di Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru;• Pembangunan infrastruktur gardu induk;• Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 311 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, dengan <i>output</i>: • Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran untuk mencegah kasus baru; • Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer-stock</i>; • Koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita; • Pendampingan, supervisi dan <i>monitoring</i> evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis; • <i>Assessment</i> eliminasi penyakit tropis (kusta); • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; • Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita; • Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan; • Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) – Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 312 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan imunisasi dasar lengkap, skrining bayi baru lahir; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i> : Penguatan <i>surveilans</i> kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia; • Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri; • Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); • Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit; • Peningkatan layanan dan kapasitas konseling upaya berhenti merokok (UBM); • Penerapan & penegakan kawasan tanpa rokok (KTR); • Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> , dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT);• Menanggulangi TB di tempat kerja;• Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran pemukiman kumuh;• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;• Melakukan penemuan aktif dan <i>skrining mobile</i> penyakit menular (kusta, HIV/AIDS, filariasis, frambusia);• Mendorong pelaporan kasus TB penyakit menular oleh fasyankes swasta;• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, Kusta, Malaria, HIV, <i>Schistosomiasis</i>);• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC penyakit menular bagi masyarakat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 314 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan di RSUD Provinsi dan Kab/Kota;• Pembinaan mutu rumah sakit untuk mencapai akreditasi paripurna;• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan;• Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan;• Menyediakan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk Skrining Kesehatan;• Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;• Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;• Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 315 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah; • Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS; • Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan; • Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan; • Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri; • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK; • Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 316 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;• Data terpadu kesejahteraan sosial;• Data dan informasi ketersediaan pangan;• Data dan informasi pendidikan dan kebudayaan;• Pengendalian Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSRE);• Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;• Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan;• Penguatan akses permodalan melalui kartu usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan;• Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko;• Peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kewirausahaan pemuda;• Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Pencegahan dan penanganan korban perkawinan anak melalui penguatan data, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan, dengan <i>output</i> : Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 318 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Merevitalisasi bangunan Satuan di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;• Membangun unit sekolah baru satuan di seluruh jenjang pendidikan;• Merevitalisasi bangunan di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di seluruh jenjang pendidikan;• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi serta penguatan ekonomi syariah, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 319 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;• Pengembangan kewirausahaan;• Pengembangan industri dan UMKM halal;• Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional;• Penguatan ekosistem halal;• Penguatan keuangan syariah;• Penguatan dana sosial syariah.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk bagi usaha kecil;• Fasilitasi bagi usaha kecil yang mendukung makan bergizi gratis.
	Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;• Akreditasi lembaga halal;• MoU kemitraan jaminan produk halal.

Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Kalimantan Timur

Ringkasan Prioritas Nasional



1

PN1 *Proyek (highlight)*



25

PN2 *Proyek (highlight)*



32

PN3 *Proyek (highlight)*



75

PN4 *Proyek (highlight)*



18

PNS *Proyek (highlight)*



35

PN6 *Proyek (highlight)*



4

PNS *Proyek (highlight)*

*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

8 Jumlah PSN



Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Pariwisata Pemalangan Derawan-Berau
- ❖ Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara
- ❖ Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara
- ❖ Kecamatan Perbatasan Prioritas Mahakam Ulu dan Berau
- ❖ Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser
- ❖ Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan

31 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 321 -

Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau A1: Kabupaten Berau	Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana induk/<i>masterplan</i> penataan dan pengembangan di kawasan Pariwisata Berau; • Pengembangan <i>Tourist Information Center</i>; • Pembangunan/Pengembangan Jalan koridor logistik; • Pembangunan/Pengembangan Jembatan koridor logistik; • Pembangunan jembatan koridor logistik (<i>backbone</i>); • Pemasangan Perlengkapan jalan; • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T.
A2	Kawasan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Pengembangan kawasan <i>superhub</i> ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i> :
A3		
A4	• A2: Kota Samarinda	• Pembangunan SPAM – Pembangunan Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku Semoi ke IPA Sepaku;
A5		
A6	• A3: Kota Balikpapan	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (IPLT) di Kota Balikpapan
A7	• A4: Kota Bontang	• Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan;
	• A5: Kabupaten Penajam Paser Utara	• Penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata;
	• A6: Kabupaten Kutai Kartanegara	• Pengembangan Desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu;
	• A7: Kabupaten Kutai Timur	• Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II;